

PETA JALAN

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

SDM Profesional, Unggul, dan Berdaya Saing Global



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Ventje Raharjo	Direktur Eksekutif KNEKS
Sutan Emir Hidayat	Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, KNEKS
Afdhal Aliasar	Direktur Industri Produk Halal, KNEKS
Taufik Hidayat	Direktur Jasa Keuangan Syariah, KNEKS
Ahmad Juwaini	Direktur Keuangan Sosial Syariah, KNEKS
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, KNEKS

TIM PERUMUS

M. Soleh Nurzaman	Kepala Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah, KNEKS
Gofur Ahmad dan Tim	PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan
Sudarmawan Samidi	Analisis Tk. 1, Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah, KNEKS
Hayati	Analisis Tk. 1, Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah, KNEKS
Atiqoh Nasution	Analisis Tk. 4, Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah, KNEKS
Annissa Permata	Analisis Tk. 5, Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah, KNEKS

KONTRIBUTOR DAN PEMBAHAS

KNEKS

Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah
Direktorat Industri Produk Halal
Direktorat Jasa Keuangan Syariah
Direktorat Keuangan Sosial Syariah
Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian Agama
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan Informasi

Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badan Amil Zakat Nasional
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Lembaga Penjaminan Simpanan
Badan Standardisasi Nasional
Badan Wakaf Indonesia
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan Pengelola Keuangan Haji
Majelis Ulama Indonesia
Kamar Dagang dan Industri

ASOSIASI

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
Masyarakat Ekonomi Syariah
Asosiasi Bank Syariah Indonesia
Asosiasi Fintek Syariah Indonesia
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia
Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Asosiasi Konsultan Keuangan Syariah Indonesia

PERGURUAN TINGGI

Universitas Indonesia
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Universitas Padjadjaran
Universitas Brawijaya
Institut Pertanian Bogor
Institut Agama Islam Tazkia
Universitas Muhammadiyah Jakarta

SAMBUTAN

“Peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kebijakan dan pelaku industri sektor ekonomi dan keuangan Syariah dalam mengembangkan berbagai program strategis peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang lebih terarah dan terukur dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ekonomi dan keuangan Syariah.”



Pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai salah satu prioritas nasional. Pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia dalam mencapai visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024.

KNEKS telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2021 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk terus tumbuh kokoh secara berkelanjutan, berdaya saing serta berperan optimal bagi pembangunan nasional.

Adanya berbagai tantangan, baik dari ketidakpastian ekonomi global dan domestik maupun perkembangan teknologi yang begitu pesat perlu direspon dan didukung oleh ketersediaan SDM dan talenta yang professional, unggul, dan berdaya saing global.

SDM yang memiliki kompetensi tinggi, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi serta mampu berpikir kreatif sangat diharapkan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah kedepannya.

Mengingat begitu strategisnya peran SDM dalam peningkatan produktivitas kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional, KNEKS memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mengawal pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM sektor ekonomi dan keuangan Syariah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, KNEKS telah menyusun dan menerbitkan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022-2024 sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan

arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perubahan dan perkembangan terkini.

Peta jalan ini juga disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan diantaranya dari kementerian dan lembaga, asosiasi industri, asosiasi profesi, dan akademisi perguruan tinggi, sehingga kami berharap masing-masing pihak dapat melaksanakan program pembangunan SDM unggul dan talenta baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Akhir kata, KNEKS menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas sinergi, kolaborasi dan kontribusi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022-2024. Harapan kami, peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kebijakan dan pelaku industri sektor ekonomi dan keuangan Syariah dalam mengembangkan berbagai program strategis peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang lebih terarah dan terukur dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, karunia dan ridho-Nya atas seluruh kerja nyata kita dalam memajukan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Eksekutif

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ventje Raharjo

KATA PENGANTAR

“Ketersediaan SDM yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi merupakan faktor kunci dalam mengatasi permasalahan SDM, terlebih saat ini kita menghadapi era disrupti seperti pandemi Covid-19 dan transformasi digital yang telah mendorong adanya perubahan tren dalam cara bekerja di semua sektor, tak terkecuali di sektor ekonomi dan keuangan syariah.”

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022-2024.

Ketersediaan SDM yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi merupakan faktor kunci dalam mengatasi permasalahan SDM, terlebih saat ini kita menghadapi era disrupti seperti pandemi Covid-19 dan transformasi digital yang telah mendorong adanya perubahan tren dalam cara bekerja di semua sektor, tak terkecuali di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dengan demikian, pembangunan SDM dan talenta merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia dimana hal tersebut membutuhkan peta jalan yang sesuai atau sejalan dengan fokus pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah kedepannya.

Peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan Syariah 2022-2024 ini merupakan panduan fundamental yang terperinci sebagai landasan dalam perencanaan dan penyusunan program-program strategis peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan talenta sektor ekonomi dan keuangan Syariah yang lebih terarah dan terukur. Sehingga, para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan Syariah dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM di masing-masing industri maupun lembaga, khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini dan perubahan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung KNEKS dalam penyusunan dan penerbitan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022-2024, yaitu para pimpinan di manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi



dan Keuangan Syariah, pimpinan satuan kerja di berbagai kementerian dan lembaga terkait, pimpinan asosiasi di berbagai industri dan profesi, dan para akademisi di perguruan tinggi. Selain itu, penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada para tim penyusun dan penulis Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022-2024.

Semoga peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ini dapat diimplementasi dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sektor ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, karunia dan ridho-Nya atas semua upaya kita dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia ke depan.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sutan Emir Hidayat

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	2
SAMBUTAN	4
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Tujuan	17
1.3 Kerangka Penyusunan Peta Jalan	18
1.4 Landasan Penyusunan Peta Jalan.....	19
BAB 2 KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.....	20
2.1. Arah Kebijakan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	20
2.2. Arah Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	26
2.3. Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	31
2.4. Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	33
2.5. Manajemen Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	35
2.6. Sasaran Strategis dan IKU Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	37
BAB 3 PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.....	40
3.1. Milestone Pembangunan SDM dan Talenta	40
3.2. Kluster Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	42
3.3. Peta Standar Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	43
3.4. Profil Kebutuhan Spesifik SDM Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	49
3.5. Model Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah....	52
BAB 4 RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.....	54
4.1. Rencana Aksi Kluster Keuangan Komersial Syariah	54
4.2. Rencana Aksi Kluster Keuangan Sosial Syariah	63
4.3. Rencana Aksi Kluster Industri Halal	71
4.4. Rencana Aksi Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 1 Sebagai Referensi Analitis Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	23
Tabel 2.	Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 2 Sebagai Referensi Analitis Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	24
Tabel 3.	Peta Kompetensi Kluster Industri Halal pada Aktivitas – Golongan Pokok Industri Pengolahan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Arah Pengembangan Dalam MPSJKI yang Menjadikan SDM sebagai Salah Satu Enabler	21
Gambar 2. Faktor Kunci Pengembangan Layanan Pembayaran Digital Syariah	22
Gambar 3. Internalisasi Agenda Prioritas RPJMN IV 2020-2024 Ke Dalam Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Eksyar	22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) Tahun 2019-2024 memperlihatkan masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi hingga tahun 2018, yakni baru sekitar 231 orang. Di samping itu, data statistik perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas, yakni hanya sekitar 9,1 % pegawai bank syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana diungkap di dalam bisnis.com menggambarkan adanya kesenjangan jumlah lulusan yang mampu

diserap oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sekitar 90% SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan program studi ekonomi Islam dan keuangan syariah. Hal ini diantaranya disebabkan karena lulusan tersebut tidak dilengkapi dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan industri. Sementara industri ekonomi dan keuangan syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada kemudian diberi pengetahuan dan keterampilan sedikit tentang ekonomi dan keuangan syariah, agar lulusan yang diterima tersebut dapat menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang pegawai.



Permasalahan lain yang melatarbelakangi penyusunan peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah adanya transformasi sistem kerja yang disebabkan karena pandemi covid-19 dan disrupti teknologi informasi, yang mengakibatkan fungsi SDM secara fisik digantikan dengan fungsi kecerdasan buatan dan *piloting machine*.

Eksistensi pegawai bekerja di kantor sebagaimana sebelum pandemi, ke depan lebih mengedepankan kolaborasi cara bekerja secara *hybrid*, yakni dengan mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh (*work remote*), memanfaatkan kecerdasan buatan dan otomasi untuk meminimalisasi peran orang sebagai penyelesaikan pekerjaan.



Dalam konteks ini, sektor perbankan sudah mulai mengarahkan perubahan orang ke dalam model bionik (*change people to bionic*) untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai rutin, statis, dan dapat diselesaikan tanpa bantuan peran manusia sebagai penyelesaian pekerjaan.

Disrupsi teknologi informasi selama beberapa tahun belakangan ini telah merubah persepsi

dan perilaku masyarakat yang cenderung menjadikan *mobile apps* sebagai bagian dari gaya hidupnya. Perubahan mendorong industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah harus mampu mentransformasikan proses dan cara kerjanya ke arah digitalisasi yang dinilai lebih efisien, efektif, dan mampu merespon secara cepat kebutuhan dan keinginan masyarakat.



Terkait internalisasi pembangunan nilai-nilai syariah melalui peran tokoh agama dan ulama dinilai masih relatif minim. Pendekatan interaksi sosial berbasis religi melalui aktivitas dan komunitas keagamaan oleh praktisi ataupun pelaksana sektor ekonomi dan keuangan syariah cenderung normatif. Padahal peran ulama dan tokoh agama dalam peningkatan pemahaman Islam dan ghirah ke-Islaman sangat strategis, khususnya dalam membantu mempercepat dan memperluas cakupan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah semenjak dulu. Pembangunan SDM semenjak dulu memegang peranan penting untuk mewujudkan talenta syariah yang unggul, profesional, dan Islami.



Aset keuangan Syariah Global pada tahun 2019 telah mencapai US\$ 2,88 T, meningkat 14% dari tahun sebelumnya



Industri keuangan Syariah global diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai US\$ 3,60 T pada tahun 2024



Perkembangan EKS: akselerasi transformasi digital, perbaikan rantai pasok global, peningkatan investasi keamanan pangan



Tahun 2019, Diperkirakan umat Muslim mengeluar-kan US\$ 2,02 T untuk makanan, farmasi, dan gaya hidup sesuai Syariah*



Total nilai Investasi dalam EKS tahun 2019 mencapai US\$ 11,8 miliar, lebih dari 90% di antaranya dari sektor Makanan Halal dan Keuangan Syariah



Pertumbuhan keuangan Syariah pada tahun 2019 didominasi oleh Sukuk pada Arab Saudi, Malaysia, Iran, Qatar, Bahrain, dan UEA.

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, Otoritas Jasa Keuangan

Tantangan pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan syariah global. Merujuk laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2020, aset keuangan syariah global pada tahun 2019 telah mencapai US\$ 2,88 triliun meningkat sekitar 14% dari pencapaian tahun sebelumnya. Industri keuangan syariah global diperkirakan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai US\$ 3,60 triliun. Pada tahun 2019, umat muslim dunia diperkirakan telah mengeluarkan US\$ 2,02 triliun untuk belanja makanan, farmasi, dan gaya hidup yang sesuai

syariah. Total nilai investasi pada tahun 2019 di sektor ekonomi dan keuangan syariah telah mencapai US\$ 11,8 miliar, lebih dari 90% di antaranya berasal dari sektor makanan halal, dan keuangan syariah. Pertumbuhan keuangan syariah global pada tahun 2019 didominasi oleh Sukuk pada Arab Saudi, Malaysia, Iran, Qatar, Bahrain, dan UEA. Dalam peta ekonomi syariah global, Indonesia berada di peringkat ke-4 *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) pada tahun 2020/2021, terutama pada kriteria *Islamic Finance, Halal Food, Travel, Modest Fashion, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics*.

Kondisi SDM ekonomi syariah Indonesia sebagai *enabler* (pengaktif) berdasarkan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2020-2024 memperlihatkan adanya beberapa tantangan yang perlu mendapatkan penguatan, di antaranya terdapat sekitar 61.389 SDM yang bekerja di Perbankan Syariah dan diperlukan setidaknya sekitar 4.500 SDM setiap tahunnya yang siap bekerja di sektor Perbankan Syariah. Tingginya kebutuhan tersebut perlu diimbangi dengan jumlah dan kualitas SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun pendidikan vokasi di jenjang menengah kejuruan.



bermanfaat terhadap pengembangan industri.

Saat ini terdapat sekitar 78.156 institusi pendidikan berbasis Islam di Indonesia dari pra sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Jumlah pondok pesantren sekitar 25.938 dengan jumlah santri diperkirakan sebanyak 3,9 juta orang santri. Namun demikian, kurikulum pada program studi ekonomi syariah ataupun yang terkait lainnya, masih kurang dalam analisis kritis maupun teknikal, sementara yang dibutuhkan industri adalah kemampuan analisa yang baik.



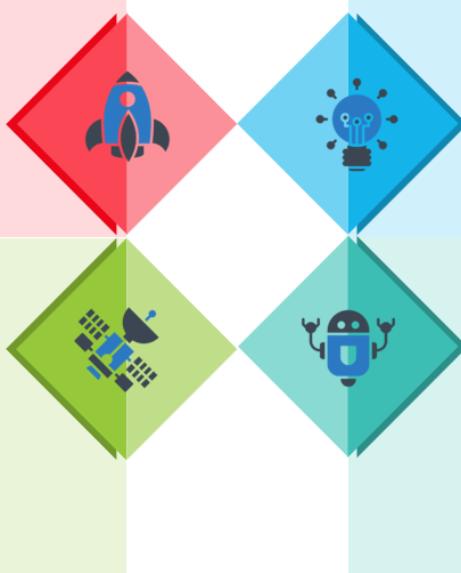
Dalam konteks ini, diperlukan ilmu perbankan murni dan ilmu syariah untuk menunjang kebutuhan pekerjaan di sektor perbankan syariah. Perguruan tinggi bersama para pemangku kepentingan harus merespons dengan melakukan harmonisasi terhadap muatan kurikulumnya agar lebih adaptif terhadap model pembelajaran yang dibutuhkan industri secara langsung.

Dalam Rencana Implementasi disebutkan adanya 3 (tiga) faktor yang dapat berkontribusi ke dalam suksesnya pengembangan SDM ekonomi syariah, yakni:

1. Mendisain kurikulum yang dapat memadai bobot ilmu syariah murni dan perbankan murni;
2. Merekrut dosen yang berkualifikasi bidang ilmu ekonomi murni dan ilmu syariah;
3. Perguruan tinggi harus menggalakan riset tentang SDM, agar hasil riset menjadi

Arah pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah juga didasari oleh adanya beberapa tantangan mewujudkan SDM kelas dunia diantaranya adalah pentingnya melahirkan SDM yang profesional, berintegritas, memiliki kemampuan *learning agility*, dan handal dalam satu penerapan sistem manajemen talenta berbasis sistem merit. Paradigma tata kelola pengembangan kompetensi SDM dalam upaya melahirkan karakteristik SDM tersebut juga perlu direkonstruksi, terutama pada model peningkatan kapasitasnya. Jika sebelumnya memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, maka ke depan dirubah arah tata kelola pengembangan kompetensi SDM melalui model pembelajaran terintegrasi.

Mewujudkan SDM yang **profesional**, **berintegritas**, **learning agility**, dan **handal** melalui: Penerapan **Manajemen Talenta berbasis Merit System**, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi sesuai prioritas pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah



Paradigma tata kelola pengembangan kompetensi SDM yang sebelumnya memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, dirubah arah tata kelola pengembangan kompetensi SDM melalui model **pembelajaran terintegrasi**

Pengembangan Pusat Talenta Syariah Nasional, melalui sistem Rekrutmen dan Seleksi, Pemetaan dan *Executive Searching*, Pembangunan Kelompok Talenta Syariah Nasional, implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP), **transformasi tata kelola lembaga Diklat menjadi *Sharia HC Corporate University***

Tantangan untuk menghasilkan Talenta Global Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah juga perlu diwujudkan melalui pembangunan Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, terutama pada bidang-bidang yang dinilai unggul dan mampu didorong untuk mencapai kualitas kelas dunia. Proses untuk menghasilkan talenta nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah dilakukan melalui serangkaian aktivitas strategis diantaranya: rekrutmen dan seleksi kandidat talenta berdasarkan kriteria talenta unggul, melakukan pemetaan dan *executives searching* di industri ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan dan pembinaan talenta yang dinilai potensial untuk meraih capaian global bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta melakukan intensifikasi pembinaan talenta-talenta bidang ekonomi dan keuangan syariah semenjak dini.

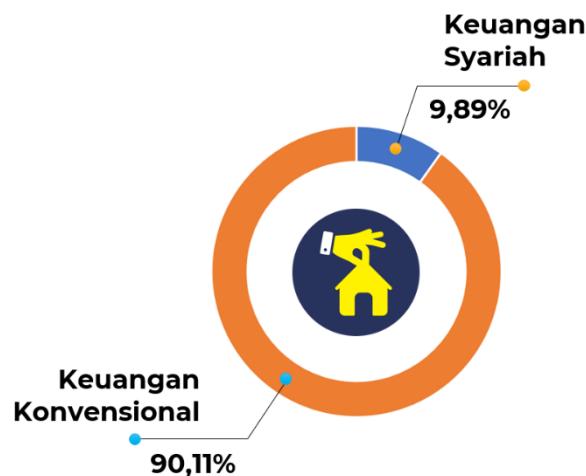
Guna mendukung pencapaian talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah diperlukan model pembelajaran terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dari berbagai segmentasi dan klasifikasi usaha. Saat ini masih belum tersedia

Pusat Pengembangan SDM dan Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mampu mengintegrasikan seluruh metode pembelajaran, bahan ajar pengembangan kompetensi, serta integrasi keilmuan ekonomi dan keuangan syariah dengan ekonomi dan keuangan konvensional.

Identifikasi awal terhadap bidang-bidang pada sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dinilai potensial untuk melahirkan talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah diantaranya adalah: Industri Makanan Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Fesyen, dan Digitalisasi dan Keuangan Sosial Syariah.



Berdasarkan Cetak Biru Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025, guna mencapai *market share* keuangan syariah di atas 10% dari 9,89% market share jasa keuangan yang dicapai sektor keuangan syariah, perlu dilakukan pengembangan SDM di bidang keuangan syariah secara berkelanjutan. Sebagai catatan, saat ini komposisi market share adalah sekitar 90,11% dicapai oleh keuangan konvensional dan sekitar 9,89% dicapai oleh keuangan syariah.



Indikator potensial lainnya yang menjadi dasar dalam pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 adalah (1) belum adanya pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan menjadi acuan nasional, (2) belum adanya pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB Indonesia, khususnya PDB syariah, (3) belum adanya indeks Maqasid Syariah nasional dan internasional, serta (4) belum adanya indeks ekonomi syariah nasional. Selain itu, Pangsa pasar syariah sebesar 9,27% di skala usaha ekonomi syariah dan peringkat Indonesia di GIEI juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk dijadikan

sebagai dasar pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Sejalan dengan itu, beberapa target ekonomi syariah tahun 2024 berdasarkan kondisi ekonomi syariah ditetapkan sebagai berikut:

SKALA USAHA EKONOMI SYARIAH

- ✓ Skala usaha ekonomi syariah naik 100% dalam 5 tahun;
- ✓ Pangsa pasar syariah mencapai 20% dalam 5 tahun.

EKONOMI MANDIRI

- ✓ Share eksport industri halal terhadap PDB naik 100% dalam 10 tahun;
- ✓ Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui share impor industri pangan dan energi turun 25% dalam 10 tahun.

PERINGKAT ISLAMIC ECONOMIC INDEX GLOBAL DAN NASIONAL

- ✓ Peringkat 5 besar GIEI;
- ✓ Indeks Ekonomi Syariah Nasional yang memuaskan.

INDEKS KESEJAHTERAAN

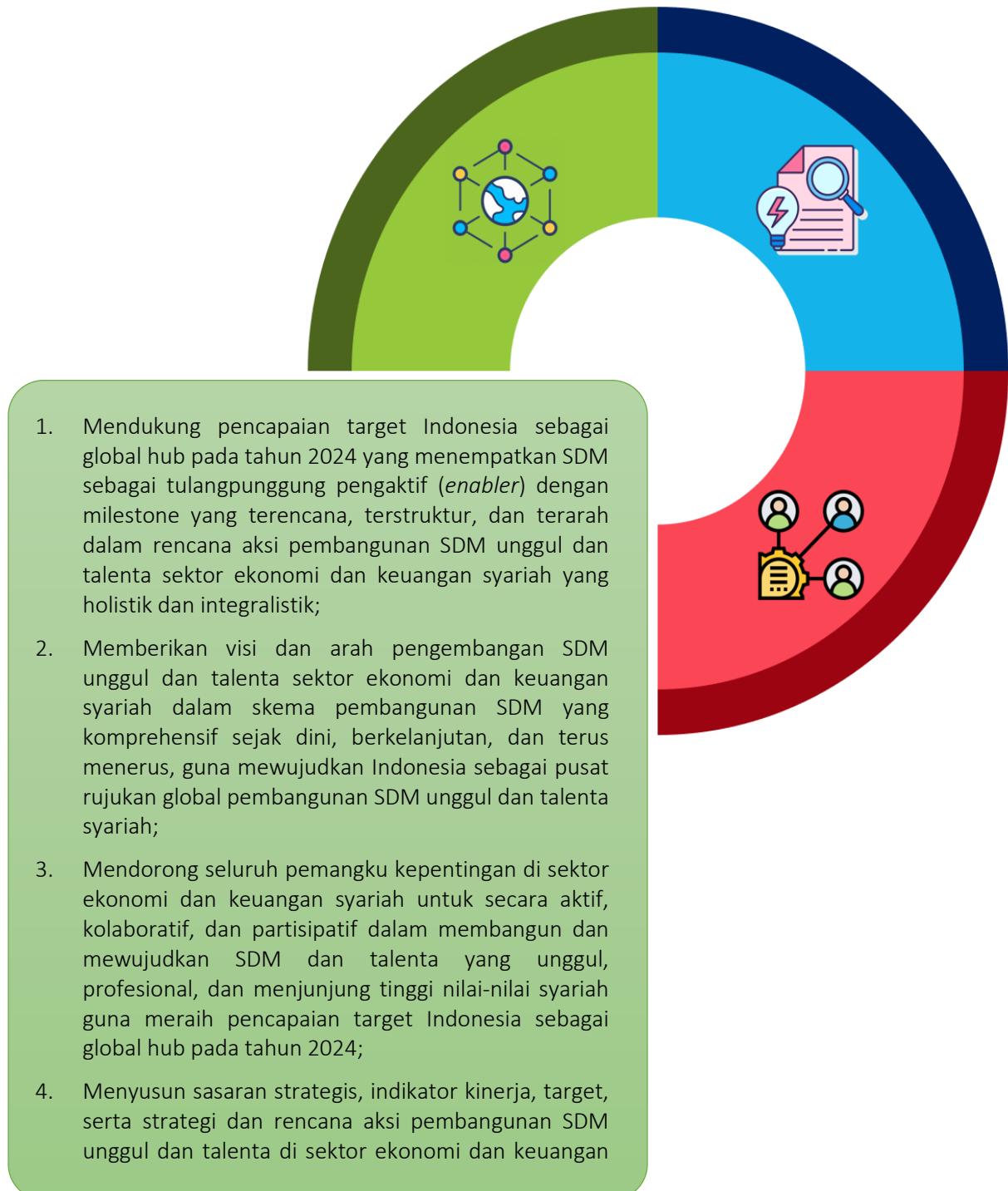
- ✓ Membangun Indeks Maqasid Syariah Nasional dan Internasional;
- ✓ Meningkatkan skor/kinerja dalam Indeks Maqasid Nasional dan Internasional.

Global Islamic Economy



1.2 Tujuan

Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah bertujuan untuk:



1.3 Kerangka Penyusunan Peta Jalan

Kerangka metodologi penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah disusun berdasarkan mandatori arahan kebijakan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan sebagai model pembangunan SDM unggul dan talenta berkelanjutan. Pengembangan SDM diselenggarakan secara holistik integralistik, dengan menghubungkan antara proses internalisasi dini hingga pembelajaran sepanjang hayat (*long life education, learning, and development*) untuk mencapai talenta yang

mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Data primer dikumpulkan, diolah, dan dianalisis melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan anggota KNEKS dan pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh, diolah, dan dianalisis berdasarkan dokumen strategik.



1.4 Landasan Penyusunan Peta Jalan

Landasan penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai referensi utama penyusunan peta jalan adalah sebagai berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL 2020-2024



MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024



Masterplan Arsitektur
KEUANGAN
SYARIAH
Indonesia

OJK | OTORITAS
JASA
KEUANGAN
CETAK BIRU
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR JASA KEUANGAN
2021 - 2025

KNEKS STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN MATERI EDUKASI UNTUK PENINGKATAN
LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

RENCANA KERJA
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
2020-2024

EKOsistE^ℳ
inDÜstRI
hALAL

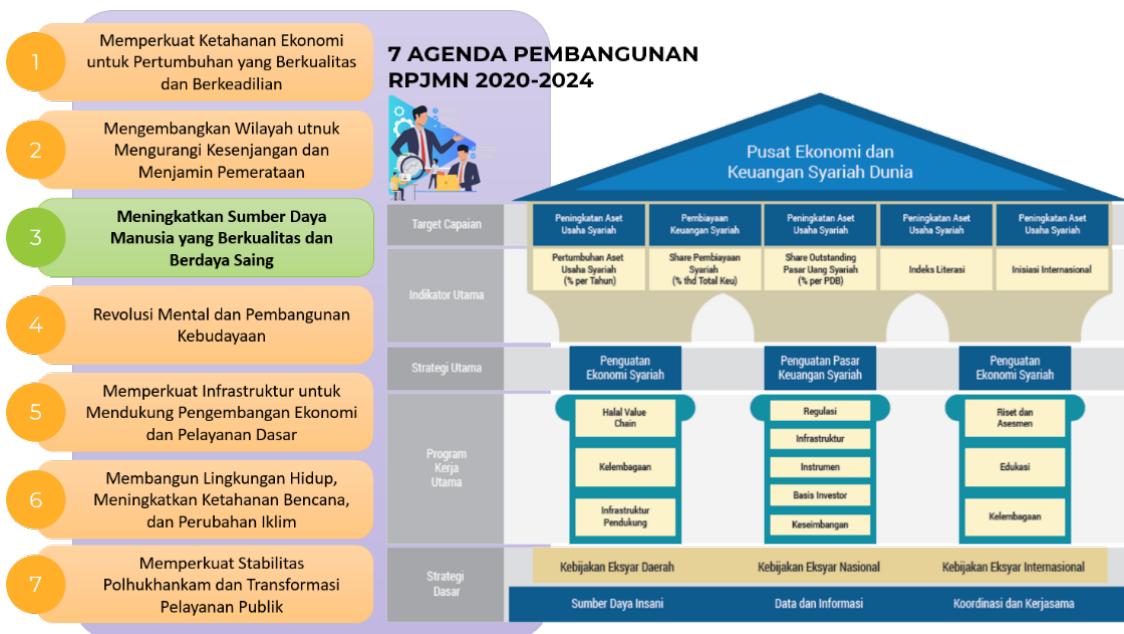


BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

2.1. Arah Kebijakan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 merupakan upaya pemerintah secara terencana untuk "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Fokus pembangunan SDM unggul menjadikan manusia sebagai modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Komitmen pembangunan SDM unggul yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter guna meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing bangsa.

Dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia pembangunan modal SDM yang terintegrasi merupakan strategi utama dalam menopang pertumbuhan industri keuangan syariah. Secara lebih khusus, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 juga mendudukan posisi strategis SDM sebagai bagian penting dari ekosistem dan strategi dasar pembangunan ekonomi syariah Indonesia. Kesiapan SDM dalam mendorong pertumbuhan di sektor ini merupakan salah satu modal dasar untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

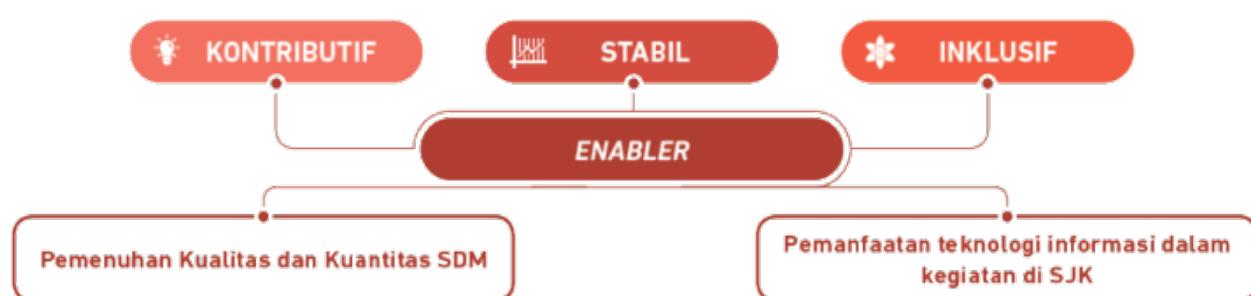


Ekosistem pembangunan ekonomi syariah yang kondusif berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 tersebut salah satunya dapat diwujukkan melalui strategi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah, baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial-keagamaan, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Tujuan dan Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia menurut Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2021-2025 menjadikan kualitas dan kuantitas SDM unggul sebagai salah satu *enabler* (pengaktif) bagi terwujudnya SJK yang stabil dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat Indonesia. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah dunia, SJK memiliki strategi untuk memaksimalkan peningkatan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu program strategis yang dilakukan adalah melalui penguatan kapasitas SDM Lembaga Jasa Keuangan Syariah dalam memasarkan produk keuangan syariah dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen.

Secara lebih khusus, *Roadmap/ Kerangka Pengembangan SDM SJK* akan memfokuskan program peningkatan kapasitas SDM SJK untuk meningkatkan awareness dan merubah mindset SDM SJK seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis SJK yang dinamis; menciptakan SDM SJK yang *agile*, kompetensi, unggul, serta berdayasaing nasional dan global; dan memenuhi *skill demand* dan *talent gap* SDM di SJK baik yang berasal dari bidang pendidikan, pelatihan, asosiasi, institusi maupun industri.

Untuk mendukung inovasi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah menginisiasi program dan kebijakan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan efisien yang mampu memitigasi potensi risiko dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Salah satu program dan kebijakan yang dilakukan adalah melalui pengembangan layanan keuangan digital syariah sejalan dengan prinsip pengembangan layanan keuangan digital *Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025*. Dalam upaya pengembangannya, terdapat empat aspek untuk mendukung keberhasilan dari pengembangan layanan pembayaran digital syariah di Indonesia, salah satunya adalah aspek Sumber Daya Manusia.



Gambar 1. Tiga Arah Pengembangan Dalam MPSKJI yang Menjadikan SDM sebagai Salah Satu Enabler

Sumber: MPSKJI Tahun 2021-2025

Faktor kunci keberhasilan pengembangan layanan pembayaran digital syariah di Indonesia pada aspek Sumber Daya Manusia ditentukan melalui upaya:

1. Mendorong peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi dengan *concern* yang tinggi terhadap ekonomi dan keuangan syariah;
2. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan Islam dan/atau pesantren untuk menciptakan santri yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;
3. Peningkatan kapasitas SDM berkualitas tinggi melalui pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri;
4. Membentuk linkage lembaga pendidikan dengan industri untuk menyalurkan peserta didik terbaik untuk mengembangkan karier di bidang informasi dan teknologi;
5. Meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi terkait ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara umum.



Gambar 2. Faktor Kunci Pengembangan Layanan Pembayaran Digital Syariah

Sumber: Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2020

Tiga dari tujuh agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan (3) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki implikasi strategis bagi pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan

syariah. Agenda memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memiliki indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah, yakni peningkatan inovasi yang merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata.



Gambar 3. Internalisasi Agenda Prioritas RPJMN IV 2020-2024 Ke Dalam Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Eksyar

Pada agenda pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam perspektif ini, arahan kebijakan makro yang harus diterjemahkan ke dalam program strategik pembangunan SDM unggul dan manajemen talenta adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya di layanan pendidikan dan pelatihan untuk program studi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 1 Sebagai Referensi Analisis Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Rasio kewirausahaan nasional	3,55%	3,95%
2	Rasio wirausaha berbasis peluang	10,30	11,13
3	Pertumbuhan wirausaha baru	3%	4%
4	Jumlah sentra IKM baru di luar Jawa yang beroperasi	10 sentra	50 sentra (kumulatif)
5	Kontribusi usaha sosial	1,90 PDB	2,50 PDB
6	Penumbuhan start-up	700 unit (kumulatif)	3.500 (kumulatif)
7	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp 1.305 – Rp 1.307 T	Rp 1.840 – Rp 1.890 T
8	Kontribusi ekonomi kreatif	3,17%	4,66%
9	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,12% – 7,54%	7,54% – 8,78%
10	Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	Rp 260 triliun	Rp 600 triliun
11	Penyediaan lapangan kerja pertahun	2,7 – 3,0 juta orang	2,7 – 3,0 juta orang
12	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
13	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	15.000 orang
14	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3,0	30 perusahaan	60 perusahaan

Berdasarkan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel 1, setidaknya pemerintah telah menargetkan sekitar 4% terjadinya pertumbuhan wirausaha baru, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah untuk berkontribusi dalam mencapai angka pertumbuhan tersebut. Kumulatif pertambahan start-up baru juga diharapkan mampu mendongkrak bisnis syariah di sektor ekonomi dan keuangan digital. Jika merujuk pada dokumen Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025, salah satu misi pengembangan SDM sektor jasa keuangan adalah “Mengembangkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang Memiliki

Kompetensi Digital” adalah sejalan dengan apa yang menjadi target pemerintah selama kurun waktu hingga tahun 2025. Target yang sejalan dengan pengembangan SDM unggul sektor ekonomi dan keuangan syariah lainnya adalah kontribusi usaha sosial yang dilakukan oleh kluster usaha keuangan sosial syariah.



Tabel 2. Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 2 Sebagai Referensi Analisis Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	29,93% (Susenas 2017)	43,86%
2	Jumlah Perguruan Tinggi terakreditasi A	91	235
3	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	42,54 (Sakernas 2018)	52,1%
4	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	39,57% (Sakernas 2018)	50%
5	Jumlah lulusan pelatihan vokasi	915.671	2,8 juta
6	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089 (BNSP 2017)	2.000.000
9	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63% (Kemenristekdikti, 2017)	80%
10	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> :		
	a. Top 100	1 (UI)	1 (UI)
	b. Top 300	2 (ITB dan UGM)	2 (ITB dan UGM)
	c. Top 500		3 (IPB, Unair, dan Unpad)
11	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional	16.147 (Kemenristekdikti, 2017)	36.500
12	Jumlah prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemenristekdikti, 2017)	243
13	Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil Litbang perguruan tinggi	762 (Kemenristekdikti, 2017)	1.849
14	Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemenristekdikti, 2017)	600
15	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	52 (Kemenristekdikti, 2017)	210
16	Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (<i>resident</i>)	790/1.362 (Kemenristekdikti, 2017)	1.000/3.000
17	Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000

Pada agenda 2 RPJMN 2020-2024, sejumlah sasaran, indikator, dan target memiliki nilai strategis bagi penyusunan peta jalan pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya adalah target jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi, yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai sekitar 2.000.000 orang.

Di sektor ekonomi dan keuangan syariah, sasaran dan target ini menjadi sangat penting, terutama untuk mendorong seluruh pelaku industri di sektor ini agar dapat memainkan perannya dalam mendorong terselenggaranya SDM yang unggul melalui sertifikasi kompetensi bidang keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah, industri halal, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Sasaran dan target lain yang juga sangat penting bagi pengembangan

SDM unggul dan manajemen talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja, yakni sebesar 80% pada tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan tinggi yang memiliki program studi bidang ekonomi dan keuangan syariah, di mana tingkat serapan lulusan di industri yang linier dengan keahlian pendidikannya masih relatif rendah. Pelaku industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah lebih suka menerima lulusan dari latar belakang pendidikan non ekonomi dan keuangan syariah, ketimbang lulusan dari bidang yang linier dengan usaha di sektor syariah.



Prospek pencapaian target yang rasional pada RPJMN 2020-2024 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor usaha ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong peningkatan SDM unggul yang memiliki talenta untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai global hub di bidang syariah pada tahun 2024.



GERAKAN Revolusi NASIONAL Mental

#AYOBERUBAH integritas•etos kerja•gotong royong

Sedangkan pada agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kmodernan. Dalam perspektif ini, arahan kebijakan makro yang harus diterjemahkan ke dalam program strategik pembangunan SDM unggul di antaranya:

1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan dan pelatihan sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
2. Revolusi mental dalam sistem sosial, sebagai upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

2.2. Arah Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta pada kluster keuangan komersial syariah diformulasikan berdasarkan pada strategi dan arah pengembangan di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, yang secara garis besar memiliki 4 (empat) program utama, yakni (1) menyelenggarakan TOT SDM keuangan syariah secara berkala dan berjenjang, (2) mengembangkan, harmonisasi, dan penyebarluasan modul pengembangan SDM keuangan syariah di perguruan tinggi, (3) serifikasi kompetensi dan penguatan IT yang terintegrasi, serta (4) mendorong berdirinya infrastruktur sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah yang mendapatkan lisensi dari BNSP ataupun akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Rencana aksi yang disusun berdasarkan kebutuhan SDM industri untuk pengembangan

sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun IKNB syariah melingkupi pengembangan SDM di lini produk, jasa/layanan, teknologi dan sistem informasi produk dan jasa, serta tata kelola lembaga dan kepatuhan syariah. Beberapa strategi yang dijalankan dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah yang inline dengan pembangunan SDM unggul dan talenta di sektor ini di antaranya: konsolidasi perbankan syariah yang membutuhkan kriteria kompetensi kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, upaya masif untuk mendorong agar pemangku kepentingan di sektor pemerintah dan BUMN dapat menempatkan dananya di perbankan syariah, dan berbagai strategi lain yang sekiranya dapat menjadi referensi strategis dalam penyusunan peta jalan.



Hal penting lainnya yang menjadi landasan dalam penyusunan peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah adalah mandatori penyelarasan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 (RIPES) dengan RPJMN pada agenda pembangunan SDM. Inisiatif strategis yang harus diturunkan dalam peta jalan adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Penguatan riset;
3. Data statistik terpadu.

Sementara pencanangan KPI pada inisiatif strategis “Pendidikan dan Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah” menitikberatkan pada:

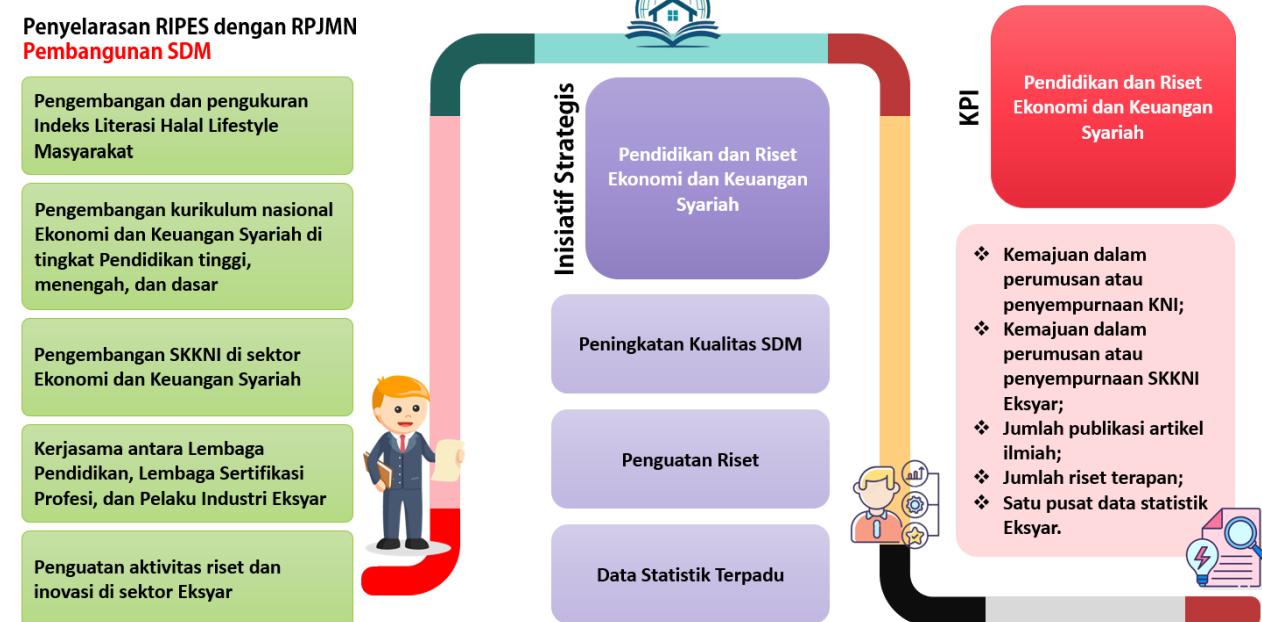
1. Kemajuan dalam perumusan atau penyempurnaan KKNI Ekonomi dan Keuangan Syariah;
2. Kemajuan dalam perumusan atau penyempurnaan SKKNI Ekonomi dan Keuangan Syariah;
3. Jumlah publikasi artikel ilmiah;
4. Jumlah riset terapan;

5. Satu pusat data statistik ekonomi dan keuangan syariah.

Inisiatif strategis dalam pembangunan SDM unggul sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan RIPES 2020-2024 menekankan pada 3 (tiga) hal utama, yakni:

1. Penyelarasan dan Pengembangan Kurikulum Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah;
2. Penataan Kompetensi SDM di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan
3. Pengembangan Ekosistem Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Salah satu mandat yang harus dijalankan untuk mendukung rencana implementasi tersebut adalah penyusunan peta jalan pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan SDM dan talenta unggulnya secara profesional.



Arah pembangunan SDM sektor jasa keuangan sebagaimana Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025 memiliki visi adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan yang Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Global dalam rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Jasa Keuangan”.

Untuk mendukung pencapaian visi SJK, ada 4 (empat) misi utama yang akan dijalankan, yakni (1) mengembangkan standardisasi kompetensi SDM SJK, (2) mengembangkan metode

peningkatan kompetensi SDM SJK, (3) Untuk mendukung pencapaian visi SJK, ada 4 (empat) misi utama yang akan dijalankan, mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan SDM SJK, dan (4) mengembangkan SDM SJK yang memiliki kompetensi digital.

Pada kluster industri halal, arah pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan peta jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2022-2024 yang menjadi program kerja utama.



Pengembangan Infrastruktur dan Kluster Industri Halal

Sebagai kontributor penting ekonomi nasional



Berkembangnya Standar Halal/Halal Assurance System (HAS)

Yang Kompetitif untuk mendukung percepatan industry produk halal nasional



Peningkatan Kontribusi Industri Halal Terhadap Neraca Perdagangan Nasional

Di Sektor-sektor unggulan



Program Kerja Utama KNEKS
Tahun 2021-2024

- ✓ Membangun Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH);
- ✓ Sertifikasi/Kodifikasi Halal Produk Eksport dan Halal Traceability;
- ✓ Pengembangan Halal Hub Port (Laut dan Udara);
- ✓ Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nasional;
- ✓ Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal;
- ✓ Program Nasional Pembinaan Menuju UMKM Bersertifikasi Halal;
- ✓ Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim; dan
- ✓ Pengembangan Industri Kesehatan Syarah.

Arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada kluster bisnis dan kewirausahaan syariah meliputi 5 program kerja utama sebagai berikut.



Sedangkan arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada kluster keuangan sosial syariah meliputi 4 program kerja utama sebagai berikut.

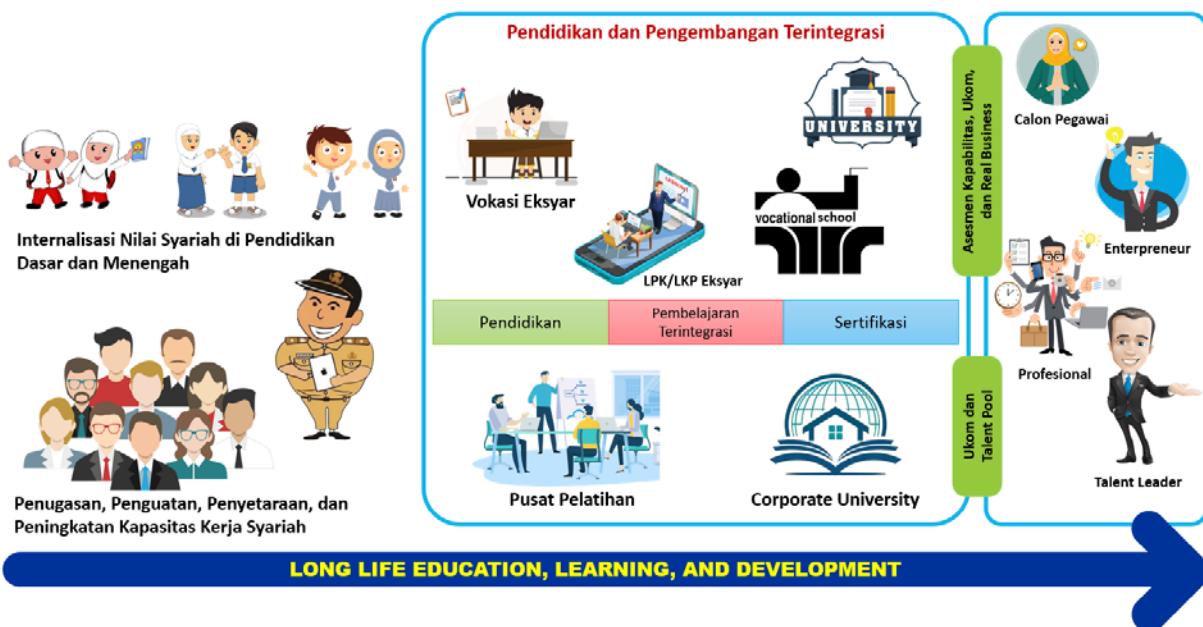


2.3. Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

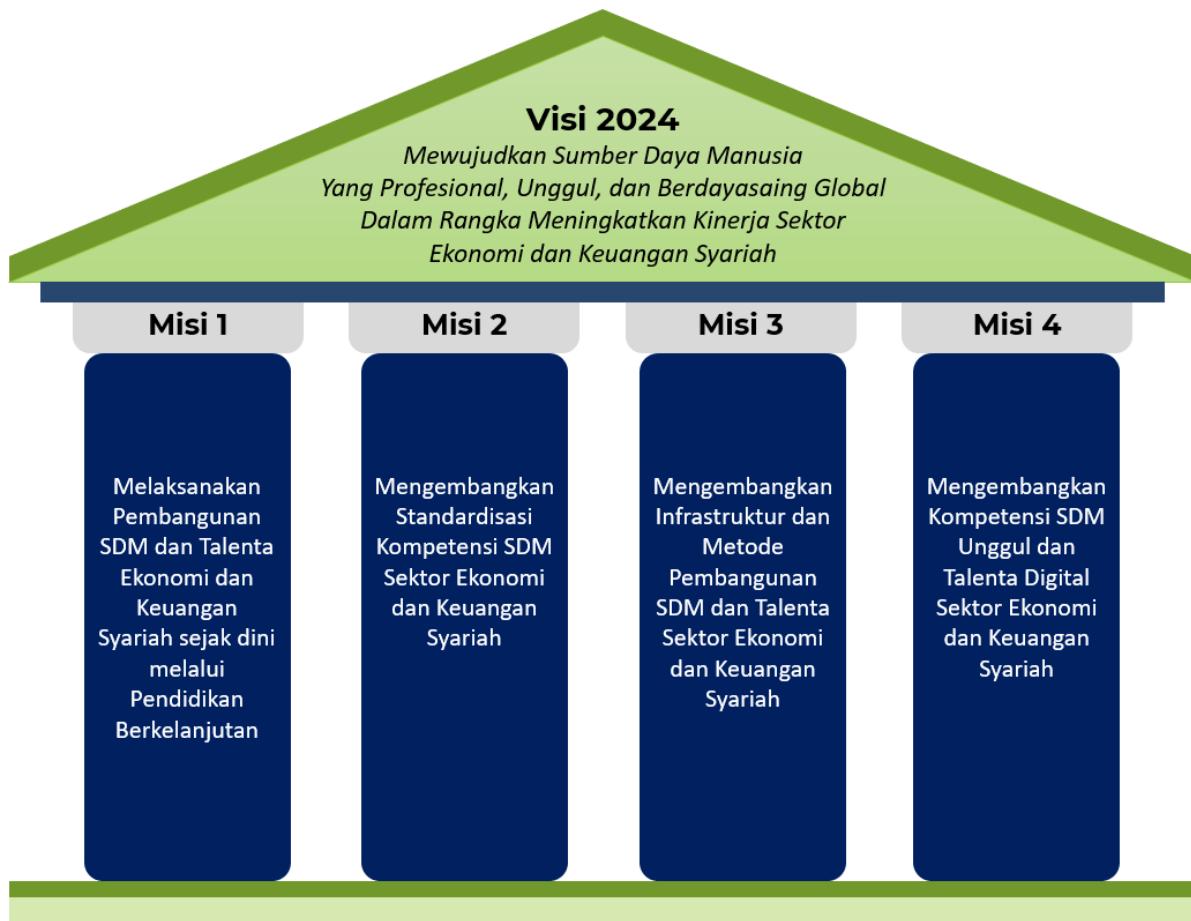
Pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global dalam Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah seyogyanya dilakukan semenjak dini. Internalisasi nilai syariah sudah mulai diberikan di jenjang pendidikan dasar dan pradasar hingga pendidikan menengah.

Sementara saat masuk ke dalam jenjang pendidikan menengah kejuruan, sekolah vokasi maupun perguruan tinggi pendalaman materi dan keahlian diberikan secara faktual, dengan merancang program kurikulum terapan industri sebanyak 70% dan penanaman nilai-nilai syariah dan karakter SDM unggul yang tangguh diberikan sekitar 10%, sementara 20% lainnya adalah teori yang memperkuat basis terapan

industri ekonomi dan keuangan syariah. Paradigma kebijakan Pembangunan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah harus menjadikan Pendidikan dan Pembelajaran sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Pembelajaran diselenggarakan secara integratif dan kriteria hasil pembelajaran adalah mampu menghasilkan talenta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di sektor ini. Di jalur pengembangan kompetensi pegawai, penguatan diberikan melalui pusat pelatihan ataupun *corporate university* yang menekankan pada pembelajaran terintegrasi dengan tempat kerja, terutama untuk memperkuat nilai-nilai syariah bagi para pegawai.



Sehingga visi pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut.



Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024, maka beberapa kriteria untuk menjadikan SDM syariah berkualitas kelas dunia perlu dijadikan sebagai rujukan, di antaranya: capaian kompetensi syariah yang bersifat generik bagi seluruh profesional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, harus memiliki kemampuan *learning agility* yang berkesinambungan, berintegritas tinggi, serta dapat diandalkan.

Untuk itu diperlukan penguatan infrastruktur pengembangan SDM unggul dan talenta ekonomi syariah yang terintegrasi dengan seluruh ekosistem pembelajaran yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat membentuk Pusat Pengembangan SDM dan Talenta Syariah Nasional melalui Pembangunan *National Sharia Corporate University*, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

2.4. Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pengenalan terhadap kondisi lingkungan strategis ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan. Komponen strategis pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah meliputi (1) ekosistem, (2) kebijakan, (3) sasaran strategis, IKU, dan target, (4) *core values*, dan (5) sistem monev. Ekosistem pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki kontribusi tinggi terhadap sukses pencapaian target SDM unggul di antaranya adalah pengembangan SDM unggul melalui pembelajaran terintegrasi (*sharia corporate university*) merupakan aktivitas yang mencerdaskan, *high impact*, menyenangkan serta berkelanjutan.

Pengembangan SDM unggul berbasis kompetensi yang terintegrasi dan

berkelanjutan, berkorelasi secara kuat dengan sistem manajemen talenta yang perlu dikembangkan secara terencana dan struktural. Manajemen talenta dengan dukungan model pengembangan SDM yang tepat akan mampu mengelola big data eksekutif di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

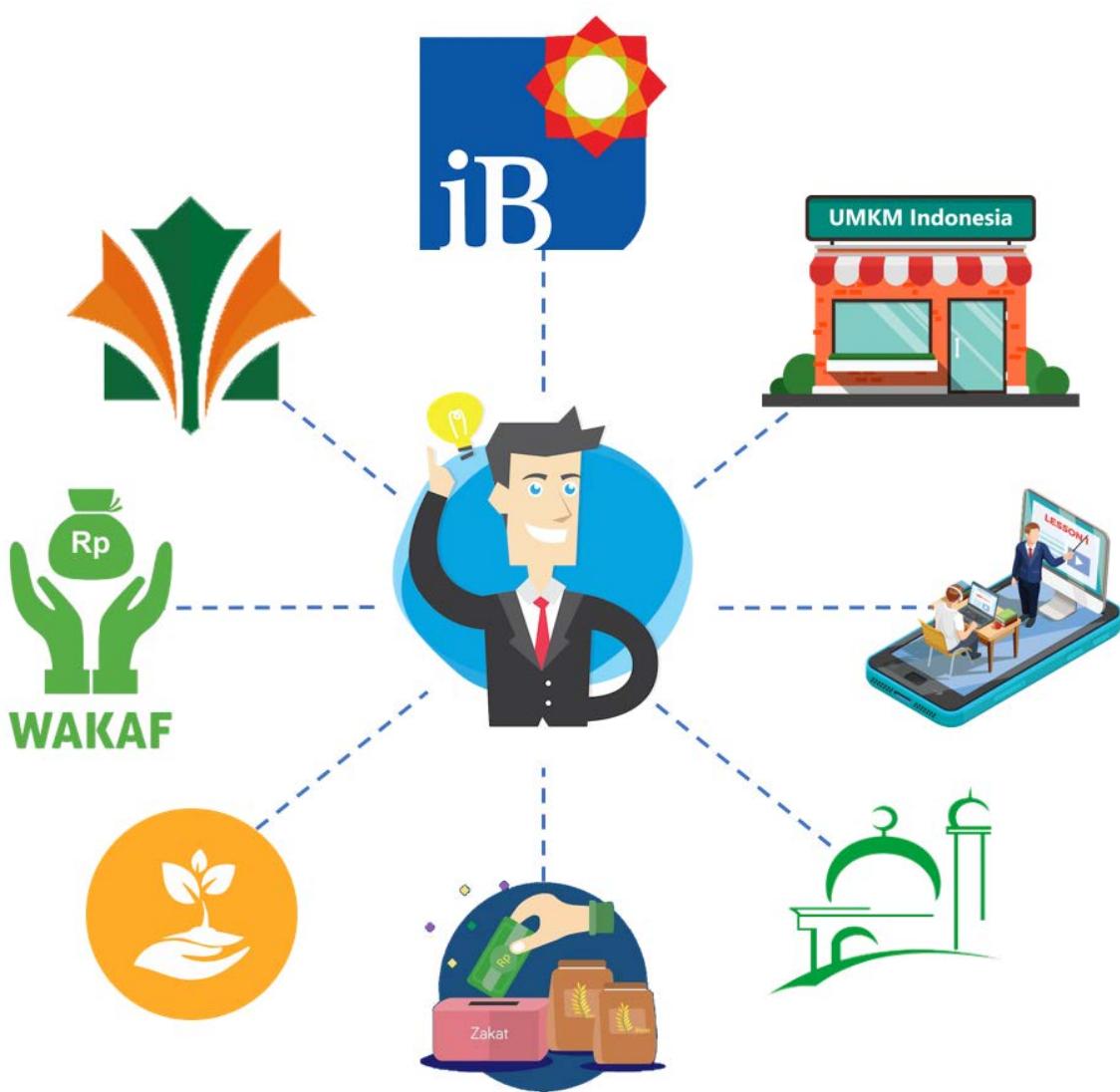
Komponen kebijakan dan regulasi memberikan landasan yuridis formal agar peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah mampu diselenggarakan secara kolaboratif dan semua pemangku kepentingan bersinergi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan di antaranya adalah penyetaraan kualifikasi dan kompetensi bidang syariah bagi seluruh pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah.



Selain itu, 2 kebijakan penting yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian visi tersebut adalah: inisiasi kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk membentuk Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah serta *Sharia Corporate University*, yang dapat diakses dan digunakan secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan manajemen pengendalian yang terorganisir.

Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pembangunan SDM unggul dan talenta

ekonomi dan keuangan syariah diturunkan berdasarkan Visi Pembangunan Industri Syariah, yang di antaranya meliputi: penyetaraan kualifikasi, jumlah SKKNI masing-masing kluster, target sertifikasi dan fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi, penyelarasan dan integrasi kurikulum ekonomi dan keuangan syariah yang berorientasi industri, pembangunan big data SDM ekonomi dan keuangan syariah, pembangunan model talenta nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya.



2.5. Manajemen Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

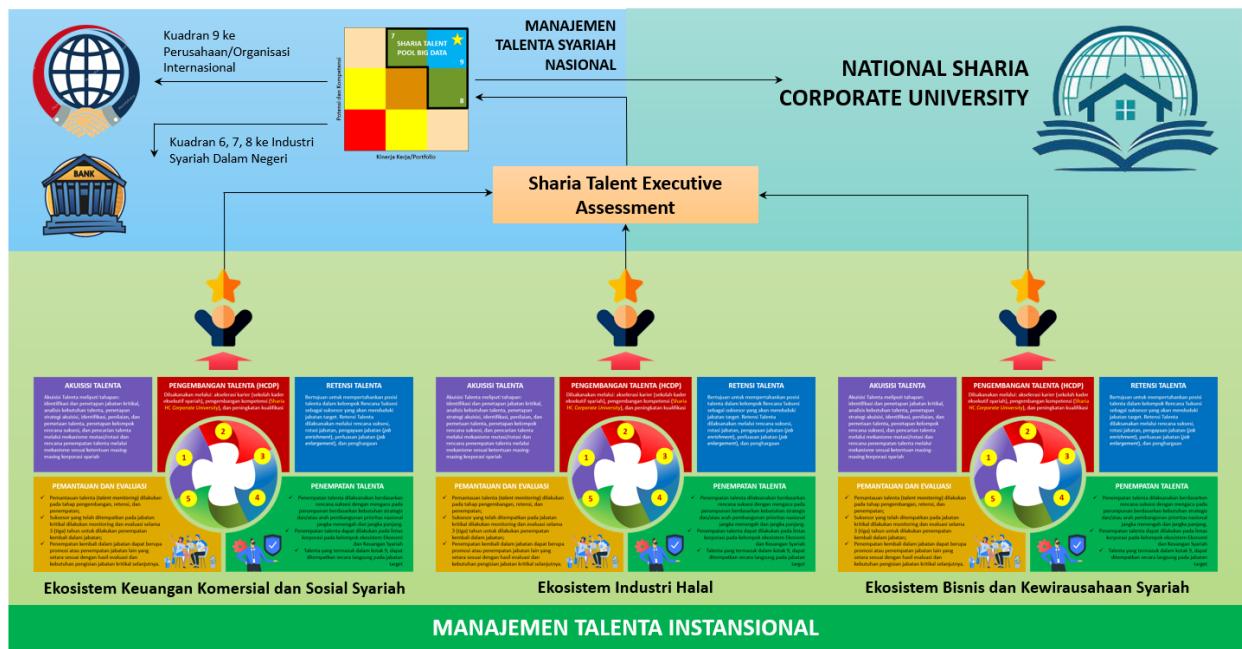
Kerangka pembangunan sistem manajemen talenta ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah harus dilakukan secara bersama, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Arah dari pembangunan manajemen talenta pada sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah mengkoneksikan seluruh kekuatan potensial yang ada di masing-masing korporasi di dalam satu ekosistem manajemen talenta. Penyatuan dalam satu manajemen talenta berskala nasional nantinya dapat digunakan oleh seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai strata. Sehingga industri dalam skala mikro, kecil, dan menengah dapat mengakses, memanfaatkan, dan mendayagunakan model manajemen talenta untuk kebutuhan internal guna menghasilkan talenta-talenta di organisasinya.

Proses manajemen talenta secara organisasi untuk mendukung pencapaian target tersedianya talenta-talenta di masing-masing sektor, hingga talenta berskala global terdiri dari 5 (lima) tahapan, yakni:

1. Akuisisi Talenta;
2. Pengembangan Talenta;
3. Retensi Talenta;
4. Penempatan Talenta; dan
5. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Capaian Target Talenta.

Visi pencapaian Indonesia sebagai Pusat Rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah perlu diwujudkan melalui penyatuan konsep dan model manajemen talenta dalam skala instasional hingga menyatu ke dalam skala nasional. Proses utama manajemen talenta secara instansional pada masing-masing ekosistem adalah:





1. *Attracting Talent:* mencari dan menarik pegawai terbaik yang memiliki potensi, kompetensi, dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. *Developing Talent:* mengembangkan pegawai terbaik berdasarkan hasil penilaian potensi dan kompetensi pada area (kuadran) *promotable* dan *rising star*;
3. *Retaining Talent:* memelihara dan mempertahankan *talent* agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi.

Sistem manajemen talenta dibangun berdasarkan kebutuhan bisnis ataupun arah pengembangan organisasi pada masing-masing ekosistem, seperti: strategi bisnis/operasi, pertumbuhan, inovasi, kebutuhan pelanggan/masyarakat, efisiensi biaya, globalisasi, kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi, dan lain sebagainya. Penetapan sistem manajemen talenta harus terkait langsung dengan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing di pasar, atau strategi organisasi untuk mencapai kinerja pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ekonomi dan keuangan syariah.

2.6. Sasaran Strategis dan IKU Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022 – 2024 menuju visi Indonesia Sebagai Pusat Rujukan, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peta Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
2	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan analisis KBLI 2020; 2. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri syariah; 3. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan adaptasi standar kompetensi internasional; 4. Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah.
3	Penyusunan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan KBLI 2020, kebutuhan industri, dan adaptasi standar internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SKKNI Bidang Keuangan Komersial Syariah; 2. Pengembangan SKKNI Bidang Keuangan Sosial Syariah; 3. Pengembangan SKKNI Bidang Industri Halal; 4. Pengembangan SKKNI Bidang Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.
4	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM di sektor keuangan komersial syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi keuangan komersial syariah; 2. Jumlah SDM di sektor keuangan sosial syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi keuangan sosial syariah; 3. Jumlah SDM di sektor industri halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi industri halal; 4. Jumlah SDM di sektor bisnis dan kewirausahaan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah.
5	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM di sektor keuangan komersial syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor keuangan komersial syariah; 2. Jumlah SDM di sektor keuangan sosial syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor keuangan sosial syariah; 3. Jumlah SDM di sektor industri halal yang mengikuti sertifikasi ahli sektor industri halal;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		4. Jumlah SDM di sektor bisnis dan kewirausahaan syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor bisnis dan kewirausahaan syariah.
6	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian pendirian LSP P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LSP P1, P2, dan P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah; 3. Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah.
7	Pengembangan Kompetensi SDM sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Ekonomi dan Keuangan Syariah; 2. Pendirian <i>Sharia Corporate University</i> yang terintegrasi dengan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah; 3. Pengumpulan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah; 4. Inisiasi pembangunan platform belajar syariah yang terintegrasi dengan <i>Sharia Corporate University</i>; 5. Peta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sektor ekonomi dan keuangan syariah; 6. Inisiasi pembangunan platform pelatihan dan kursus syariah untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan penerima peserta Kartu Pra Kerja; 7. Jumlah SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring.
8	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi pembentukan Talenta Nasional sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Pemetaan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang berpotensi mencapai keunggulan global yang akan dikembangkan oleh Manajemen Talenta Nasional sektor ekonomi dan keuangan syariah; 3. Pembinaan talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah; 4. Pendampingan pencapaian global sektor ekonomi dan keuangan syariah; 5. Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor ekonomi dan keuangan syariah.
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan dan belajar sepanjang hayat sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi, dan jenjang pendidikan tinggi untuk bidang ekonomi dan keuangan syariah dengan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		<p>kompetensi pelaksanaan tugas industri ekonomi dan keuangan syariah;</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pembangunan platform LMS sektor ekonomi dan keuangan syariah; 4. Pembuatan materi edukasi literasi sektor ekonomi dan keuangan syariah; 5. Inisiasi pembangunan KMS sektor ekonomi dan keuangan syariah; 6. Pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, yang akan diintegrasikan ke dalam KMS sektor ekonomi dan keuangan syariah; 7. Profiling peta profesi yang mengalami disrupti dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi; 8. Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) sektor ekonomi dan keuangan syariah.



BAB III

PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

3.1. Milestone Pembangunan SDM dan Talenta

Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022-2024 dengan target di akhir tahun 2024 “Indonesia Sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Pusat Rujukan Global Halal *Value Chain*”, merupakan peta jalan menuju Indonesia Sebagai Global Hub Tahun 2024. Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah terkonsentrasi pada 4 (empat) tahapan utama yang menjadi koridor dari penjabaran masing-masing sasaran strategis pada jabaran target-target IKU hingga tahun 2024. Berikut adalah milestone pencapaian Visi Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021-2024.

Pencapaian Visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun

2024 diawali dengan program strategis peletakan pondasi SDM unggul dan talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk melakukan penguatan dan pemantapan karakter Islami SDM dan talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah yang profesional. Pada tahapan ini sejumlah program unggulan strategis dan rencana aksi dijalankan oleh pemangku kepentingan, mulai dari perancangan kebijakan pembangunan SDM, harmonisasi dan penyelarasan kebijakan antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM unggul dan talenta melalui program-program pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan terintegrasi, hingga pemantapan dan program literasi nasional, dan berbagai program unggulan strategis lainnya yang akan dijabarkan secara spesifik di dalam program pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah tahun 2021-2024.





Pada tahun 2023 diharapkan *bridging* untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai pusat rujukan global pembangunan SDM dan talenta ekonomi dan keuangan syariah telah tuntas dilakukan dengan program standardisasi global. Untuk mewujudkan program standardisasi global tersebut yang harus dilakukan adalah dengan mengadaptasi standar kompetensi internasional ke dalam standar kompetensi kerja sektor ekonomi dan keuangan syariah.

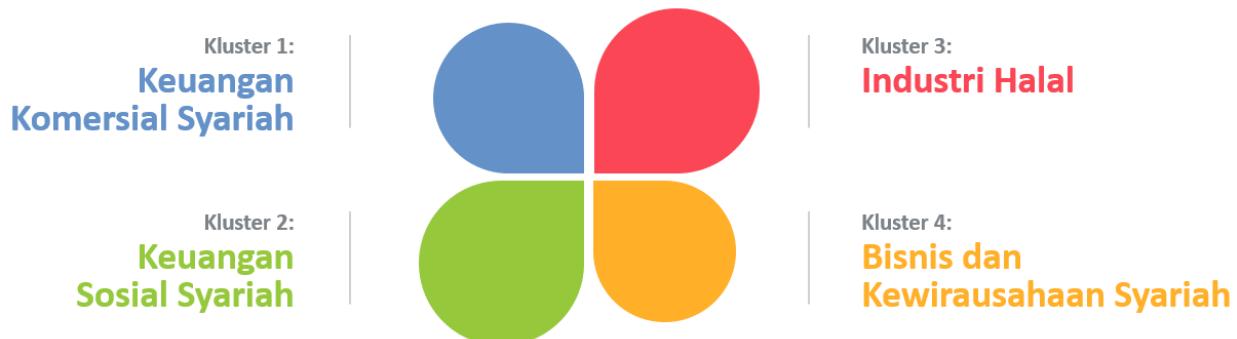
Adaptasi SKI juga diikuti dengan penggalian terhadap kompetensi berskala global pada kluster-kluster yang ada di dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Milestone pencapaian pada masing-masing tahun perlu dikokohkan dengan sejumlah kajian, diseminasi, pemetaan kondisi eksisting, dan aspek yuridis peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta syariah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target hingga target besar di tahun 2024. Pembangunan terhadap sistem, kelembagaan, dan infrastruktur yang mendukung pencapaian target Indonesia sebagai pusat rujukan menjadi sangat penting untuk diselenggarakan secara berkesinambungan.

3.2. Kluster Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Agar dapat fokus dalam melakukan program Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, penjabaran terhadap sasaran strategis, indikator kinerja,

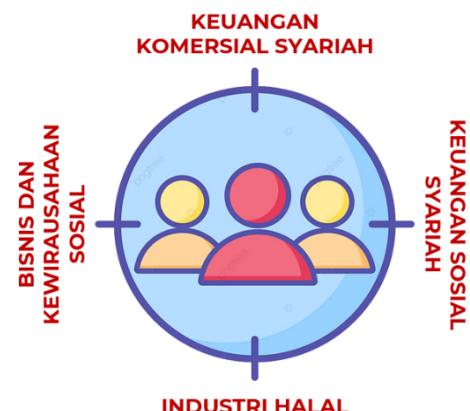
target, alokasi waktu, program strategis, strategi, hingga kerangka pengendalian pencapaian dibagi menjadi 4 (empat) kluster utama, yakni sebagai berikut.



1. **Kluster Keuangan Komersial Syariah**, yang terdiri dari ekosistem Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah;
2. **Kluster Keuangan Sosial Syariah**, yang terdiri dari ekosistem Pengelolaan Dana Haji, ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), Pengelolaan keuangan masjid, ormas, pesantren, dan keuangan sosial lainnya seperti LKMS, BMT, dan seterusnya;
3. **Kluster Industri Halal**, yang meliputi: marketplace syariah, travel halal, farmasi

dan komestik halal, makanan halal, fashion halal, media dan rekreasi halal dan ramah muslim, teknologi pangan dan kehalalan produk, halal supply chain, UMKM pangan Halal, serta industri pengolahan yang diproses melalui mekanisme halal;

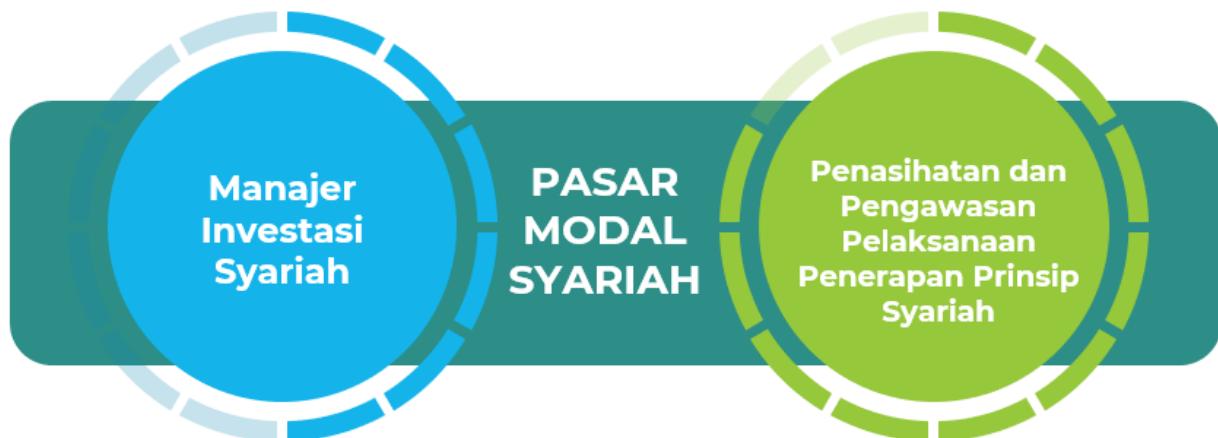
4. **Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**, yang di antaranya meliputi: usaha ultra mikro syariah, UMKM industri halal, pemasaran syariah, ekspor produk halal UMKM, manajemen produksi dan operasi syariah, serta ekosistem digital ekonomi syariah.



3.3. Peta Standar Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peta standar kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk masing-masing kluster disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan kebutuhan industri masing-masing kluster dan ekosistem.

1. Kluster Keuangan Komersial Syariah



Untuk Industri Keuangan Non Bank yang masuk ke dalam kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) berdasarkan KBLI 2020 meliputi:

- ✓ Asuransi;
- ✓ Reasuransi;
- ✓ Penjaminan;
- ✓ Dana Pensiun.



Aktivitas	Golongan Pokok	Bidang/Sub Bidang/Profesi
Asuransi	Asuransi	a. Jasa Pertanggungan b. Pengelolaan Risiko
	Penjaminan	Pemberian Jaminan Finansial
	Reasuransi	a. Pertanggungan Ulang Risiko b. Penjaminan Ulang Risiko c. Reasuransi Syariah d. Unit Syariah Reasuransi
	Dana Pensiun	a. Pengelolaan Program Pensiun b. Pertanggungan Pengelolaan Risiko c. Perhitungan Manfaat Asuransi d. Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Asuransi Jiwa e. Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah Asuransi Umum



2. Kluster Keuangan Sosial Syariah

Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster keuangan sosial syariah adalah sebagai berikut.



3. Industri Halal

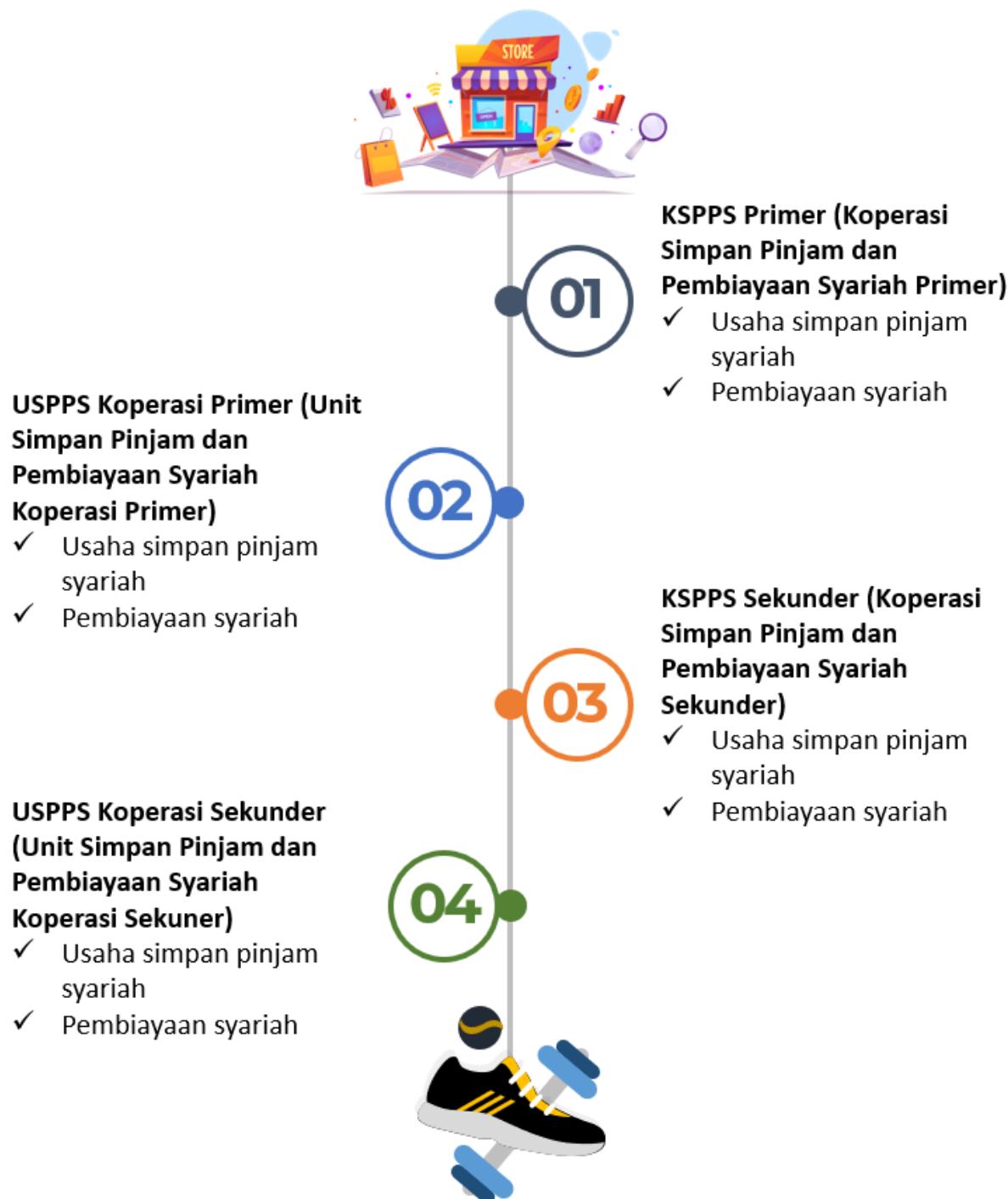
Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster industri halal adalah sebagai berikut.

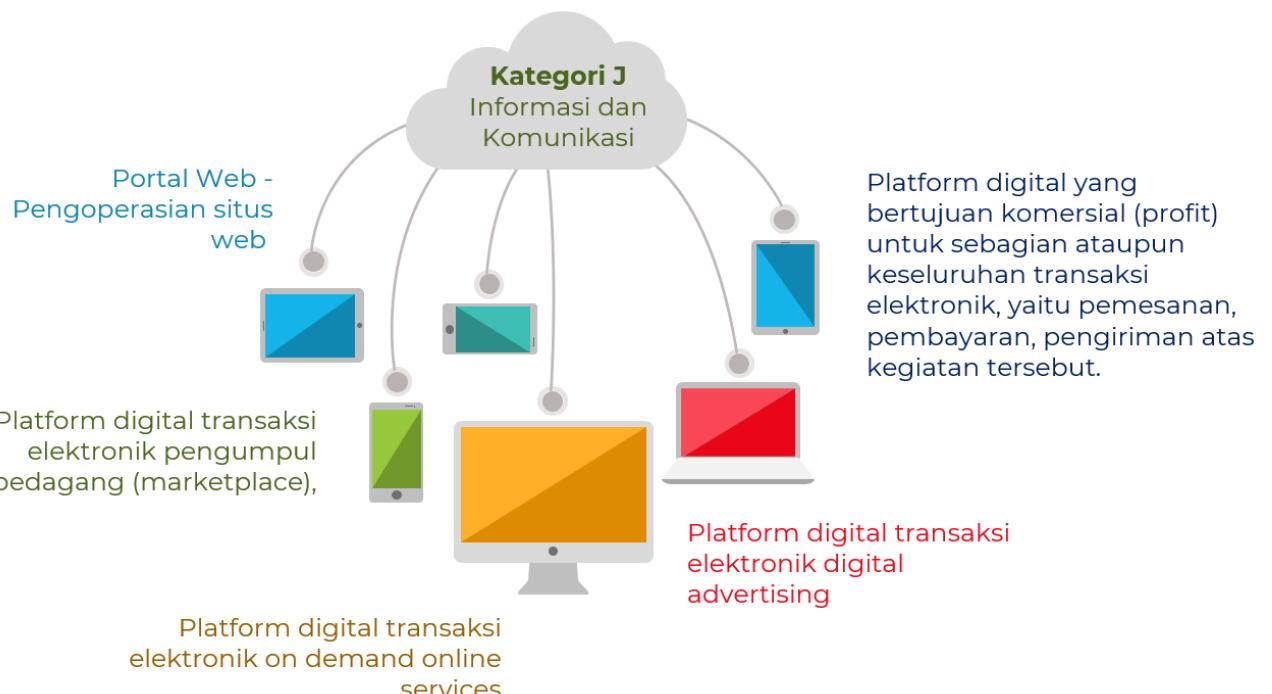
Tabel 3. Peta Kompetensi Kluster Industri Halal pada Aktivitas – Golongan Pokok Industri Pengolahan

KATEGORI	GOLONGAN POKOK	GOLONGAN	BIDANG/OKUPASI
Industri Pengolahan (C)	Industri Makanan (10)	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (101)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengepakan dan Pengemasan Daging; 2. Pembekuan daging; 3. Daging yang dikeringkan; 4. Daging yang diasapkan/ diasinkan; 5. Pengawetan daging; 6. Produksi olahan daging.
	Industri Minuman (11)	Industri Minuman (110)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan air minuman ringan dalam kemasan; 2. Pengemasan.
	Industri Tekstil (13)	Industri Pemintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Tekstil (131)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan serta tekstil; 2. Degreasasi dan karbonasi wol; 3. Retting tanaman tumbuhan serta tekstil.
	Industri Pakaian Jadi (14)	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya (141)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pakaian jadi; 2. Pembuatan barang-barang dari kulit berbulu; 3. Pembuatan rajutan dan sulaman.
	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (21)	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia (2101)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrosesan obat jadi; 2. Bioteknologi; 3. Pengolahan darah; 4. Pengolahan kelenjar; 5. Pengolahan obat kontrasepsi hormonal.
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (R)	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya (91)	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya (910)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan daya tarik wisata budaya; 2. Pengelolaan cagar budaya atau bangunan bersejarah;
	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya (93)	Aktivitas Rekreasi lainnya (932)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian fasilitas dan menyediakan jasa rekreasi, taman hiburan, dst; 2. Fasilitas angkutan rekreasi; 3. Pengelolaan wisata alam; 4. Pengelolaan wisata buatan/binaan manusia; 5. Pengelolaan wisata tirta;

4 Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

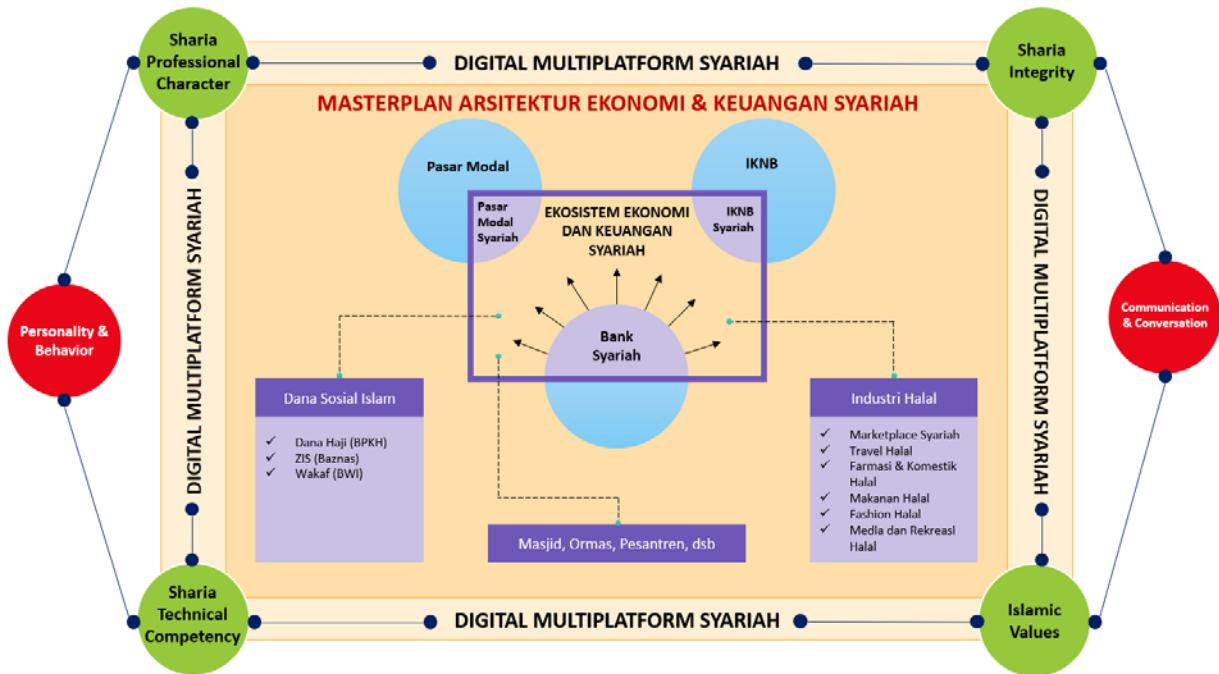
Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster bisnis dan kewirausahaan syariah adalah sebagai berikut.





Platform digital yang mendukung pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah dapat mengakses era pencapaian target kinerja pada masing-masing ekosistem. Interaksi konektivitas antarpemangku kepentingan dilayani melalui layanan antar muka berbasis digital multiplatform.

Untuk itu dibutuhkan talenta digital yang memiliki penguasaan di bidang teknologi informasi, dengan karakter syariah yang kokoh agar mampu mendorong terselenggaranya ekosistem bisnis syariah yang shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah.



3.4. Profil Kebutuhan Spesifik SDM Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster keuangan komersial syariah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan industri meliputi: (1) SDM pada

ekosistem perbankan syariah, (2) SDM pada ekosistem pasar modal syariah, dan (3) SDM pada ekosistem IKNB syariah.

Perbankan Syariah	Pasar Modal Syariah	IKNB Syariah
<ul style="list-style-type: none">✓ Sertifikasi Standar Profesi secara bertahap (Komisaris, Direksi, Tenaga Ahli, dan DPS);✓ Manajemen Risiko Perbankan Syariah Tingkat I – III;✓ Pembiayaan Korporasi dan Sindikasi;✓ Certificate in International Trade and Finance (CITF);✓ Wealth Management untuk Nasabah Prioritas;✓ Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).	<ul style="list-style-type: none">✓ Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM);✓ Kompetensi Kesyarahan Pelaku Industri: Pengelola Shariah Online Trading System (SOTS), Manajer Investasi Portfolio Syariah, Underwriter Sukuk dan Surat Berharga Lainnya;✓ Pendampingan Calon Perusahaan Penerbit Efek Syariah;✓ Pemeriksaan Efek Syariah Pasar Modal.	<ul style="list-style-type: none">✓ Sertifikasi Standar Profesi yang Bertahap (Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas, Tenaga Ahli, dan DPS);✓ Kompetensi Kesyarahan Pelaku Industri IKNB Syariah;✓ Kompetensi dalam Bidang Investasi/Asset dan <i>Liability Management</i>;✓ Kompetensi dalam Bidang Risk Management;✓ Kompetensi Aktuaria dan Akuntansi Transaksi pada Asuransi Syariah (PSAK 108);✓ Kompetensi IT.



Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster keuangan sosial syariah serta kluster bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan

industri meliputi: (1) SDM sektor zakat, (2) SDM sektor wakaf, dan (3) SDM sektor keuangan mikro syariah.



- ✓ SKKNI Nazhir, sebagai kolaborasi Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf Produktif, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan, dengan harapan bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- ✓ SKKNI Amil terdiri atas 37 unit kompetensi yang meliputi pengumpulan, manajemen tata kelola harta benda wakaf, menjaga dan mengembangkan aset wakaf, menyalurkan hasil manfaat harta benda wakaf);
- ✓ Pengembangan yang perlu difokuskan antara lain (1) peningkatan jumlah asesor (2) peningkatan peserta sertifikasi, dan (3) biaya sertifikasi yang lebih terjangkau

- ✓ SKKNI Nazhir, sebagai kolaborasi Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf Produktif, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan, dengan harapan bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- ✓ SKKNI Amil terdiri atas 37 unit kompetensi yang meliputi pengumpulan, manajemen tata kelola harta benda wakaf, menjaga dan mengembangkan aset wakaf, menyalurkan hasil manfaat harta benda wakaf);
- ✓ Pengembangan yang perlu difokuskan antara lain (1) peningkatan jumlah asesor (2) peningkatan peserta sertifikasi, dan (3) biaya sertifikasi yang lebih terjangkau

Sertifikasi Kualifikasi Pengelolan Keuangan Mikro Syariah

- Mendorong program-program pelatihan/sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah, Asosiasi/sekunder/APEX, BNSP, lembaga sertifikasi profesi maupun pihak lainnya. Melalui mekanisme ini akan mendorong para pengelola koperasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, apabila program ini dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten akan menjadi faktor yang signifikan terhadap penguatan institusi dan industri.
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah

Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster industri halal berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan

industri meliputi: (1) sertifikasi halal, (2) riset sains halal, dan (3) pelaku usaha produk halal,

Sertifikasi Halal

- ✓ Tenaga Pelaksana, BPJPH;
- ✓ Ulama Fatwa Halal;
- ✓ Tenaga Pelaksana LPH: Manajemen LPH, Auditor Halal;
- ✓ Tenaga Pelaksana, Pendamping/Pelaksana Pembinaan Halal: Tenaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Tenaga Relawan, CSR Perusahaan, Ormas Islam, Konsultan Halal (Menengah dan Besar);
- ✓ Internal Pelaku Usaha: Penyelia Halal, Manajer/Eksekutif Halal;
- ✓ Tenaga Pelaksana, Penunjang Utama Rantai Nilai Produk Halal: Juru Sembelih Halal, Operator/Manajemen RPH



Riset Sains Halal

- ✓ Ahli Peneliti Sains Halal;
- ✓ Laboran Sains Halal;
- ✓ Perangkat Akademis.

Pelaku Usaha Produk Halal

- ✓ Owner/Pengelola Usaha Produk Halal;
- ✓ Pelaksana Operasional Produksi Produk Halal;
- ✓ Korporasi Produsen Produk Halal.

3.5. Model Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024, dibutuhkan integrasi kolaboratif antar pemangku kepentingan di empat kluster pembangunan SDM dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip dari pengembangan SDM dan talenta yang dilakukan adalah saling memberikan dukungan, penguatan, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha besar yang memiliki infrastruktur pembelajaran dan pengembangan kompetensi, untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya.

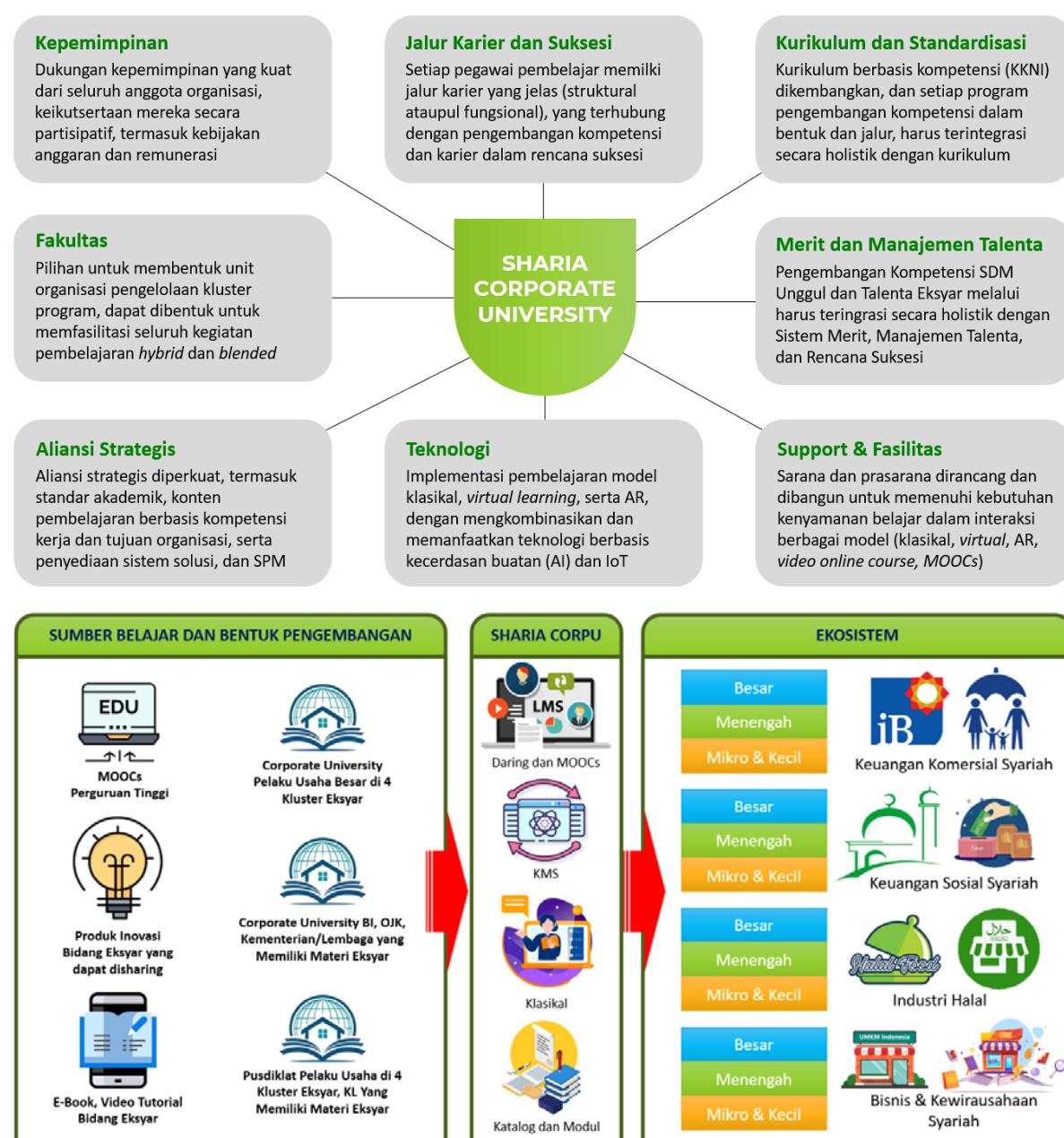
Kolaborasi penyiapan SDM kompeten diawali dengan merancang model pengembangan SDM unggul dan talenta yang sesuai dengan karakteristik SDM dan talenta masing-masing kluster. Untuk menunjang kerjasama kolaboratif antar pemangku kepentingan, perlu dibangun Pusat Pengembangan SDM Unggul

dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah. Inisiasi dilakukan oleh KNEKS dengan melibatkan pemangku kepentingan di sektor pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pembelajaran terintegrasi melalui *Sharia Corporate University*. Selain membangun *Sharia Corporate University*, perlu juga dibangun kolaborasi strategis untuk mengembangkan model penilaian kompetensi dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah secara berkesinambungan dan saling sinergi, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat ikut memanfaatkan model fasilitasi ini. Integrasi keilmuan, kualifikasi, dan kompetensi dari seluruh ekosistem pembelajaran dilakukan dengan menarik kebutuhan industri sebagai penghela, bagi terselenggaranya sistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang dapat dinikmati seluruh pemangku kepentingan.



Model *Sharia Corporate University* menjadi pilihan terbaik untuk menyatukan ekosistem pembelajaran untuk pengembangan kompetensi syariah yang dapat diakses secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki infrastruktur pembelajaran terintegrasi melalui

Corporate University, didorong untuk memberikan model dan sumber belajarnya ke dalam *Sharia Corporate University*. Selanjutnya melalui *Sharia Corporate University*, seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses sumber belajar dan ikut berpartisipasi dalam bentuk-bentuk pembelajaran yang dikembangkan.





BAB IV

RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

4.1. Rencana Aksi Kluster Keuangan Komersial Syariah

Rencana Aksi kluster **Keuangan Komersial Syariah** disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2025, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A	Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Keuangan Komersial Syariah				
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Pasar Modal Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Keuangan Non-Bank Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
4	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor perbankan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
5	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor pasar modal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
6	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor IKNB syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
B	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Keuangan Komersial Syariah				
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah berdasarkan analisis KBLI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKBN syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKBN syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, BNSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C	Penyusunan SKKNI Sektor Keuangan Komersial Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
2	Perumusan SKKNI Bidang Pembiayaan Korporasi dan Sindikasi pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
3	Perumusan SKKNI Bidang <i>International Trade and Finance</i> pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
4	Perumusan SKKNI Bidang <i>Wealth Management</i> pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
5	Perumusan SKKNI Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
6	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Umum Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BUS, UUS, asosiasi perbankan syariah, KNEKS
7	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Unit Usaha Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BUS, UUS, asosiasi perbankan syariah, KNEKS
8	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BPRS, asosiasi BPRS, KNEKS
9	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BPRS, asosiasi BPRS, KNEKS
10	Perumusan SKKNI Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM)	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
11	Perumusan SKKNI Ahli Pengelola Syariah Online Trading System (SOTS)	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
12	Perumusan SKKNI Manajer Investasi Portfolio Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
13	Perumusan SKKNI Manajer Investasi Portfolio Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
14	Perumusan SKKNI Ahli Underwriter Sukuk dan Surat Berharga Lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
15	Perumusan SKKNI Bidang Pendampingan Calon Perusahaan Penerbit Efek Syariah pada Pasar Modal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
16	Perumusan SKKNI Bidang Pemeringkatan Efek Syariah Pasar Modal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
17	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Investasi Pengelola Reksa Dana pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
18	Perumusan SKKNI Bidang Penjaminan Emisi Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
19	Perumusan SKKNI Bidang Pemasaran Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
20	Perumusan SKKNI Ahli Penilai Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
21	Perumusan SKKNI Jaringan Sistem Elektronik yang Bersifat Terbuka pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
D	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Keuangan Komersial Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang perbankan syariah melalui sertifikasi kompetensi perbankan syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
2	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang pasar modal syariah melalui sertifikasi kompetensi pasar modal syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
3	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang IKND syariah melalui sertifikasi kompetensi IKNB syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
E	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Keuangan Komersial Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang perbankan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Jumlah SDM di sektor pasar modal syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pasar modal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
3	Jumlah SDM di sektor IKNB syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang IKNB syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
F Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Keuangan Komersial Syariah					
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LSP P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor keuangan komersial syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Perbankan Syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Pasar Modal Syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor IKNB Syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
G Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Keuangan Komersial Syariah					
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Keuangan Komersial Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Keuangan Komersial Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Pembentukan dan Penguatan Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i> yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
3	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor keuangan komersial syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
4	Inisiasi pembangunan Platform Belajar Syariah untuk sektor keuangan komersial syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Pusat Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
5	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemendibud Ristek, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
6	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor keuangan komersial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenaker, KSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
7	Jumlah SDM sektor perbankan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
8	Jumlah SDM sektor pasar modal syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
9	Jumlah SDM sektor IKNB syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
H	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Keuangan Komersial Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Keuangan Komersial Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
2	Pemetaan bidang keuangan komersial syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
3	Pemetaan talenta sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
4	Pembinaan talenta global sektor keuangan komersial syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor keuangan komersial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BI, OJK, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemenkominfo, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
I	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Keuangan Komersial Syariah				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
4	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
5	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster keuangan komersial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
6	Pembuatan materi edukasi melalui literasi perbankan syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
7	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster keuangan komersial syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
8	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, success story solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
9	Profiling peta profesi yang mengalami disrupti dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
10	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

4.2. Rencana Aksi Kluster Keuangan Sosial Syariah

Rencana Aksi kluster **Keuangan Sosial Syariah** disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2025, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Keuangan Sosial Syariah					
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Ziswaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor dana haji Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di lembaga keuangan mikro syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
4	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Ziswaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
5	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor dana haji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
6	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di lembaga keuangan mikro syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswaf, organisasi masyarakat pengelola Ziswaf, asosiasi
B Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Keuangan Sosial Syariah					
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswaf, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan analisis KLBI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswaf, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswaf, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C	Penyusunan SKKNI Sektor Keuangan Sosial Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Pengembangan SKKNI Amil Zakat	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah, asosiasi zakat
2	Penyusunan KKNI Nazir wakaf	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah, asosiasi zakat
3	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Risiko Keuangan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UKM, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
4	Perumusan SKKNI Bidang Pembiayaan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UKM, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
5	Perumusan SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UKM, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
6	Perumusan SKKNI Bidang Bank Wakaf Mikro	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UKM, Baznas, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
7	Perumusan SKKNI Pengelola BMT	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UKM, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
D Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Keuangan Sosial Syariah					
1	Jumlah SDM di sektor Ziswaf yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang Ziswaf melalui sertifikasi kompetensi Ziswaf		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Kemenkeu, Organisasi Ziswaf, asosiasi Ziswaf
2	Jumlah SDM di sektor pengelolaan dana haji yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang pengelolaan dana haji melalui sertifikasi kompetensi pengelolaan dana haji		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenkeu, BPKH, asosiasi keuangan sosial syariah
3	Jumlah SDM di sektor lembaga keuangan mikro syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang LKMS melalui sertifikasi kompetensi LKM syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenkeu, industri LKM syariah, asosiasi LKM syariah
E Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Keuangan Sosial Syariah					
1	Jumlah SDM di sektor Ziswaf yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang Ziswaf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baznas, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
2	Jumlah SDM di sektor pengelolaan dana haji yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pengelolaan dana haji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baznas, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
3	Jumlah SDM di sektor LMKS yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang LMK syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baznas, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
F Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Keuangan Sosial Syariah					
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LSP P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor keuangan sosial syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Ziswaf untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, Kemenag, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Pengelolaan Dana Haji untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, Kemenag, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor LKMS untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, Kemenag, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
G	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Keuangan Sosial Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Keuangan Sosial Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Keuangan Sosial Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
2	Pembentukan dan Penguatan Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i> yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
3	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor keuangan sosial syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
4	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor keuangan sosial syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
5	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
6	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor keuangan sosial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
7	Jumlah SDM sektor Ziswaf yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
8	Jumlah SDM pengelolaan dana haji yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
9	Jumlah SDM sektor LKMS yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemenkop UMKM, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
H	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Keuangan Sosial Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Keuangan Sosial Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
2	Pemetaan bidang keuangan sosial syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
3	Pemetaan talenta sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
4	Pembinaan talenta global sektor keuangan sosial syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Pusat Pengembangan Kompetensi Syariah, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor keuangan sosial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BI, OJK, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Pusat Pengembangan Kompetensi Syariah, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemenkominfo, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
I	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Keuangan Sosial Syariah				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, emendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
4	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
5	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster keuangan sosial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
6	Pembuatan materi edukasi melalui literasi keuangan sosial syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
7	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster keuangan sosial syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
8	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
9	Profiling peta profesi di sektor keuangan sosial syariah yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
10	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi

4.3. Rencana Aksi Kluster Industri Halal

Rencana Aksi kluster **Industri Halal** disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2025, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Industri Halal					
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, BPJPH, MUI, Industri makanan dan minuman halal, asosiasi makanan dan minuman halal
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, BPJPH, MUI, Industri pariwisata ramah muslim, asosiasi pariwisata
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, BPJPH, MUI, Zona Industri dan KIH, asosiasi industri halal
4	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, BPJPH, MUI, Industri Pengolahan Halal, asosiasi industri pengolahan halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
5	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Kesehatan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, MUI, Industri Kesehatan Syariah, asosiasi industri kesehatan syariah
6	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Lembaga Pemeriksa Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, MUI, lembaga pemeriksa halal, asosiasi pemeriksa halal
7	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di Rumah Potong Hewan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, MUI, rumah potong hewan halal, asosiasi pemotongan hewan halal
8	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, MUI, Kemenkop UMKM, UMKM halal, asosiasi UMKM halal
9	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Industri makanan dan minuman halal, asosiasi makanan dan minuman halal
10	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Industri pariwisata ramah muslim, asosiasi pariwisata
11	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Zona Industri dan KIH, asosiasi industri halal
12	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Industri Pengolahan Halal, asosiasi industri pengolahan halal
13	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Industri Kesehatan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Industri Kesehatan Syariah, asosiasi industri kesehatan syariah
14	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Lembaga Pemeriksa Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, lembaga pemeriksa halal, asosiasi pemeriksa halal
15	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Rumah Potong Hewan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, rumah potong hewan halal, asosiasi pemotongan hewan halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
16	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, MUI, Kemenkop UMKM, UMKM halal, asosiasi UMKM halal
B Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Industri Halal					
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan analisis KLBI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan identifikasi kebutuhan industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C Penyusunan SKKNI Sektor Industri Halal Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020					
1	Perumusan SKKNI Bidang Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Perumusan SKKNI Bidang Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
3	Perumusan SKKNI Bidang Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Perumusan SKKNI Bidang Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Perumusan SKKNI Bidang Industri Kesehatan dan Farmasi Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Perumusan SKKNI Bidang UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
D	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Industri Halal				
1	Jumlah SDM di sektor industri makanan dan minuman halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang industri makanan dan minuman halal melalui sertifikasi kompetensi industri makanan dan minuman halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Jumlah SDM di sektor industri pengolahan halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang industri pengolahan halal melalui sertifikasi kompetensi industri pengolahan halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Jumlah SDM di sektor pariwisata ramah muslim yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang pariwisata ramah muslim melalui sertifikasi kompetensi pariwisata ramah muslim		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
E	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Industri Halal				
1	Jumlah SDM di sektor industri makanan dan minuman halal yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang makanan dan minuman halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Jumlah SDM di sektor pariwisata ramah muslim yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pariwisata ramah muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Jumlah SDM di sektor industri pengolahan halal yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang industri pengolahan halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
F	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Industri Halal				
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor industri halal semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
G	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Industri Halal				
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Industri Halal Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Industri Halal dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pembentukan dan Penguatan Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i> yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor Industri Halal (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor Industri Halal yang akan diintegrasikan ke dalam Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor Industri Halal yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
7	Jumlah SDM sektor Industri Halal yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
H	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Industri Halal				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Industri Halal untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan bidang Industri Halal yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Pemetaan talenta sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Pembinaan talenta global sektor Industri Halal dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor Industri Halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
I	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Industri Halal				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster industri halal yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Pembuatan materi edukasi melalui literasi industri halal pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
7	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster industri halal yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
8	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS industri halal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
9	Profiling peta profesi yang mengalami disrupti dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
10	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BPJPH, Kemeperin, MUI, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

4.4. Rencana Aksi Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Rencana Aksi kluster **Bisnis dan Kewirausahaan Syariah** disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2025, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah					
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
B Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah					
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan analisis KLBI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
C	Penyusunan SKKNI Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Perumusan SKKNI Bidang Bisnis Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Perumusan SKKNI Bidang Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
D	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor bisnis syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang bisnis syariah melalui sertifikasi kompetensi bisnis syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
2	Jumlah SDM di sektor kewirausahaan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang kewirausahaan syariah melalui sertifikasi kompetensi kewirausahaan syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
E	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor bisnis syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang bisnis syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Jumlah SDM di sektor kewirausahaan syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
F	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 Bisnis dan Kewirausahaan Syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan sertifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
G	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pembentukan dan Penguatan Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i> yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor Bisnis dan Keuangan syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
5	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor Bisnis dan Kewirausahaan syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Platform Pengembangan Kompetensi <i>Triple Helix</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
7	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
8	Jumlah SDM sektor Bisnis syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
9	Jumlah SDM sektor Kewirausahaan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
H	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan bidang Bisnis dan Kewirausahaan syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
3	Pemetaan talenta sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Pembinaan talenta global sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenperin, Kemenkop dan UMKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
I	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan kewirausahaan syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan kewirausahaan syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker,

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
	bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan kewirausahaan syariah				Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
4	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster bisnis dan keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
5	Pembuatan materi edukasi melalui literasi bisnis dan kewirausahaan syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
6	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster bisnis dan kewirausahaan syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
7	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, success story solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
8	Profiling peta profesi sektor bisnis dan kewirausahaan syariah yang mengalami disrupti dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

NO	URAIAN	TAHAP 1			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
9	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

